



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3/001/DTKP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024
DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 Pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

- KEDUA : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 Diingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan data, bahan serta uraian analisa masing-masing indikator kinerja yang diampu oleh masing-masing bidang, sekretariat dan UPT BLK, yang akan digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah : menyiapkan data dan bahan yang akan digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKJ), melakukan verifikasi terhadap data dan bahan yang akan digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKJ), membuat uraian analisa masing-masing indikator kinerja yang diampu oleh masing-masing bidang, sekretariat dan UPT BLK.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2025

**an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,**



MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 100.3.3/001/DTKP/2025
Tanggal : 03 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kabid Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kabid Perindustrian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Tata Usaha UPT BLK	Anggota
10.	Penanggungjawab Tugas dan Fungsi Hubungan Industrial	Anggota
11.	Penanggungjawab Tugas dan Fungsi Pengupahan dan Jamsostek	Anggota
12.	Penanggungjawab Tugas dan Fungsi Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
13.	Penanggungjawab Tugas dan Fungsi Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
14.	Penanggungjawab Tugas dan Fungsi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
15.	Penanggungjawab Tugas dan Fungsi Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
16.	Penanggungjawab Tugas dan Fungsi Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota
17.	Penanggungjawab Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Industri	Anggota

**an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,**



**MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 05 Februari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024.

Pada Tahun 2024 secara keseluruhan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut rata-rata capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 110,9% dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan., hal ini dimana ketiga indikator tersebut mampu terealisasi melebihi dari yang ditargetkan. Ketiga indikator tersebut didukung dengan 8 (delapan) program yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 22.944.120.103,76,- dan realisasi sebesar Rp. 18.872.168.610,- atau tercapai 90.11%. Berdasarkan penjelasan diatas maka secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2024 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LKj ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 05 Februari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascaing Kinerja	5
E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	20
G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	22
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya	29
E. Sistematika Penyajian	31
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	33
A. Tujuan dan Sasaran Strategis	34
B. Indikator Kinerja Utama	36
C. Perjanjian Kinerja 2024	41
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	47
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	53
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	53
B. Akuntabilitas Keuangan	156
Bab IV PENUTUP	168

A. Kesimpulan	168
B. Strategi Peningkatan Kinerja	168

LAMPIRAN

- 1) IKU
- 2) Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2024
- 3) Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 4) Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
- 5) Monev Renstra
- 6) Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, yang mana RPD ini mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2026, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan yang seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerjanya ditahun – tahun berikutnya.
3. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

C. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69).

D. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Cascading Disnakerind 2024

[illegible]

E. PROSES BISNIS, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1. Proses Bisnis

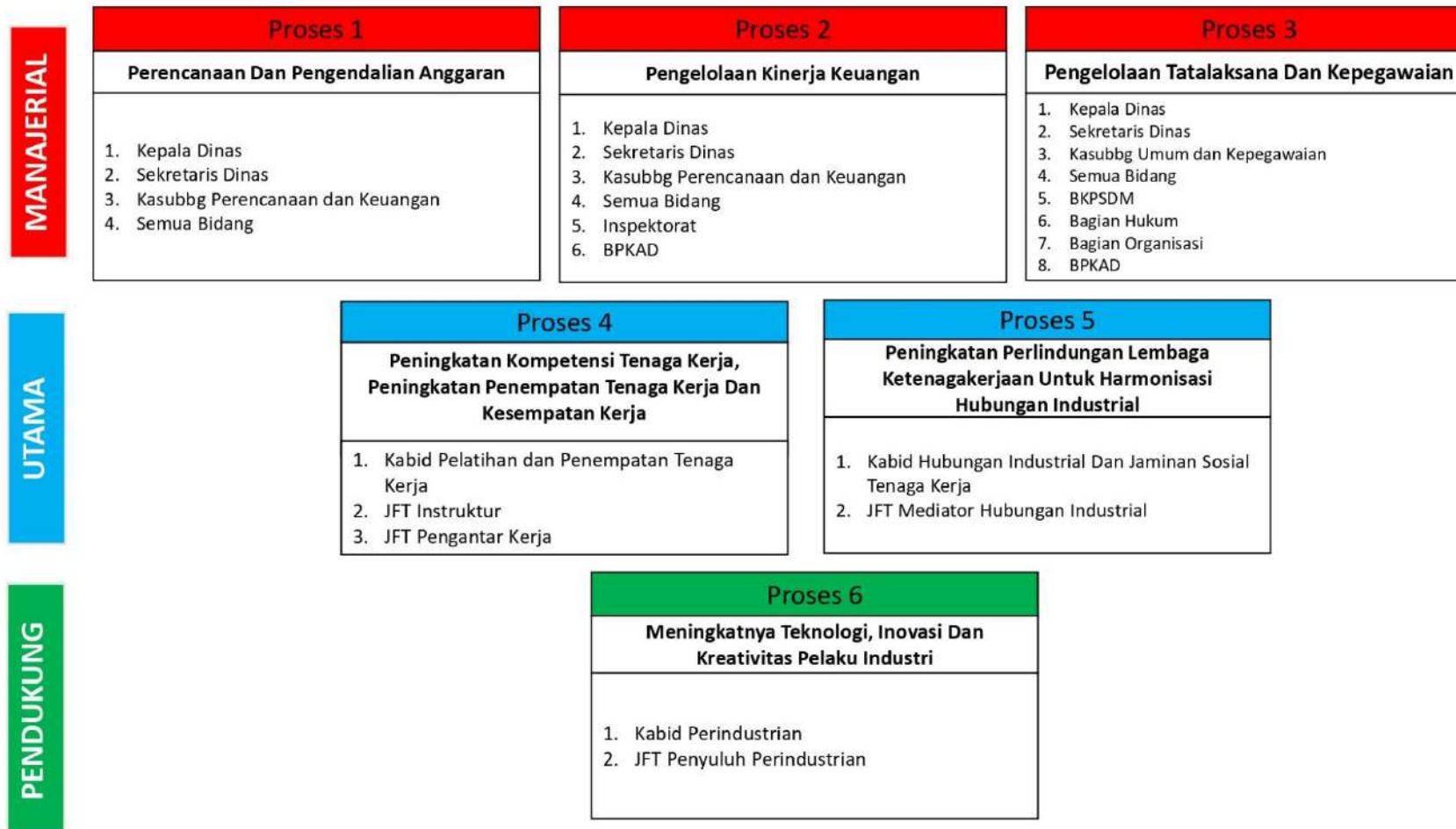
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis dilingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut membuat Peta Proses Bisnis sebagaimana dibawah ini :

Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis Disnakerind



Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, yang mana RPD ini mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2026, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan yang seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerjanya ditahun – tahun berikutnya.
3. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

C. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tanah Laut akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut berakhir pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas diatas, maka dengan demikian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024-2026 yang juga sudah mengacu kepada RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berikut adalah tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, yang merupakan acuan dalam SKPD untuk menentukan tujuan dan sasaran SKPD.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET		KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		IPM	70,35	70,1 - 70,72	70,80	71	71,30
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,32	12,35	12,37	12,39	12,4
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	7,95	8,05	8,15	8,25
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96	69,98	70,00
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	22,22	30	40	45	50
			Persentase atlet berprestasi	86,97	85	85	90	95
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	87,28	87,30	87,32	87,34	87,36
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi	5,12	4,5 - 5,0	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0
			Gini Ratio	0,263	0,230	0,229	0,228	0,227
			Angka Kemiskinan	3,86	3,55	3,45	3,35	3,30
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	2,70	3,80	2,85	2,9	2,95
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,86	3,48	3,52	3,55	3,58
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,10	4,81	4,9	4,95	5,0
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	6,54	12,10	11,75	11,70	11,70
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	83,91	5	5	5	5
			Indeks Resiko Bencana	156,33	153,2	150,1	147	144
	2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	13,32	15	17,5	20	22,5
	2.9	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82,06	82,3	82,6	82,8	83
	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	3,55	3,45	3,35	3,30
	2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	0,707	0,73	0,74	0,75	0,76
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60,19 (Baik)	61	62	63	65
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	67,28 (B)	69,00 (B)	70,01 (BB)	75,00 (B)	80,01 (A)
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	49,38 (SPP)	61 (PB)	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)
	3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik	4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A
	3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,11	3,15	3,2	3,4	3,6

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 diatas, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024-2026, dengan 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

- Tujuan ke 1 yaitu Menurunnya Tingkat Pengangguran, dengan sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja.
- Tujuan ke 2 yaitu Meningkatkan Kontribusi/ laju Sektor Industri Pengolahan, dengan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah
- Tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sasaran Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Disnakerind.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024	2025	2026
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69%	69%	69%
2	Meningkatkan Kontribusi/ laju Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Mennyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	10%	10,5%	11%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	81,55	83,50	84

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (*measurable*) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 thn keatas}} \times 100\%$	Bidang P2TK/UPT BLK/BPS
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Menniyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	$\frac{\text{Nilai produksi IKM tahun n} - \text{Nilai produksi IKM tahun n-1}}{\text{Nilai produksi IKM tahun n} - 1} \times 100\%$	Bidang Perindustrian
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	Hasil Penilaian tim SAKIP Kabupaten	Sekretariat

Adapun Indikator Kinerja Eseleon 3 dan 4 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Eselon 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Bidang P2TK Bidang HIJSTK
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	Bidang Industri
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai SAKIP Disnakerind	Sekretariat

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Eselon 3

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Kompeten	Bidang P2TK & Kepala UPT BLK
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persent Serapan Tenaga Kerja Yang Terdaftar	
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	1. Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Bidang HIJSTK
		2. Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindungi Jaminan Ketenagakerjaan	
4	Meningkatkan IKM Yang Menerapkan Standarisasi Industri	Persentase IKM Yang Menerapkan Standarisasi Industri	Bidang Perindustrian
5	Meningkatkan Pengembang Nperwilayahan Industri	1. Persentase Pengembangan Sentra IKM	
		2. Persentase Pengembangan Kawasan Industri	
6	Meningkatkan Akses Pemasaran IKM	Persentase Akses Pemasaran IKM	
7	Meningkatnya Data Pelaku Industri Di Siinas	Persentase Kepatuhan Industri Terhadap Siinas	Sekretariat
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1. Nilai Komponen Perencanaan	

		2. Nilai Komponen Pengukuran	
		3. Nilai Komponen Pelaporan	
		4. Nilai Komponen Evaluasi Internal	
		5. Nilai Survey Pelayanan Kesekretariatan	

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Eselon 4

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1.	Memastikan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2.	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	Index kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	
3	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	
4	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	
5	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
6	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
7	Menciptakan pelayanan administrasi kepegawaian dengan optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag TU BLK
8	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang baik dan optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	
9	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah sesuai penganggaran yang efisien dengan	
10	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	

11	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
12	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	
13	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	
14	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
15	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
16	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	
17	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
18	Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	
19	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi unjungan tamu	
20	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
21	Terlaksananya dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	
22	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	
23	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	
24	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
25	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	

26	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
27	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	
28	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	
29	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
30	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	

C. PERJANJIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2024 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas dan Para Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tabel 2.7
Target Indikator Kinerja Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69%
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai usaha IKM dalam menyokong perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	3,6%
3	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja dinas tenaga kerja dan perindustrian	Nilai SAKIP dinas tenaga kerja dan perindustrian	81,55

2. Eselon 3

Tabel 2.8
Target Indikator Kinerja Eselon 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase peserta latih yang berkompeten	9	Kabid P2TK dan Kepala UPT BLK
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja yang Terdaftar	24	
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	25%	Kabid HIJSTK
		Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Jaminan Ketenagakerjaan	40%	
4	Meningkatnya IKM yang Menerapkan Standarisasi Industri	Persentase IKM yang menerapkan standarisasi industri	3%	Kabid Perindustrian

5	Meningkatkan Pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Sentra IKM	33%	
		Persentase Pengembangan Kawasan Industri	6%	
6	Meningkatkan Akses Pemasaran IKM	Persentase Akses Pemasaran IKM	16,83%	
7	Meningkatnya Data pelaku Industri di SIINas	Persentase Kepatuhan Industri Terhadap SIINas	40%	
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1. Nilai Komponen Perencanaan	24	Sekretaris
		2. Nilai Komponen Pengukuran	24	
		3. Nilai Komponen Pelaporan	12	
		4. Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	
		5. Nilai Survey Pelayanan Keskretariatan	90	

3. Eselon 4

Tabel 2.9
Target Indikator Kinerja Eselon 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator	Penanggung Jawab
1	Memastikan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	1. Index kepuasan pelayanan administrasi	3	

		keuangan perangkat daerah		
3	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	
4	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	
5	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	
6	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	
7	Menciptakan pelayanan administrasi kepegawaian dengan optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3	
8	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang baik dan optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	3	
9	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah sesuai penganggaran yang efisien dengan	3	
10	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	
11	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	

12	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	6 Paket	
13	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	
14	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	
15	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 Paket	
16	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	14 Paket	
17	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 Paket	
18	Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	
19	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	24 Laporan	
20	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan	
21	Terlaksananya dukungan pelaksanaan system	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system	2 Dokumen	

	pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		
22	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	22 Unit	
23	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	
24	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	
25	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	
26	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	
27	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	
28	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	59 Unit	
29	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	

30	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	
----	--	--	--------	--

D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan :

Tabel 2.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
A	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		232.309.921,00
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	232.209.921,00
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	207.565.674,00
	2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	24.744.247,00
B	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		1.112.538.346,99
	1	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	122.150.301,00
	1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	99.960.301,00
	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	22.190.000,00
	2	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	785.400.849,99

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
	1	Pelayanan antar Kerja	230.545.011,99
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	554.855.838,00
	3	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00
	1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5.000.000,00
	4	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	199.987.196,00
	1	Job Fair/Bursa Kerja	199.987.196,00
C	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		2.285.869.159,00
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.285.869.159,00
	1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	10.400.000,00
	2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.898.300.024,00
	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	246.535.150,00
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		5.270.554.488,00
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.217.007.167,00
	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	5.173.453.091
	2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	43.554.076,00
	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	53.547.321,00
	1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	53.547.321,00
Jumlah			8.901.271.914,99

B. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian :

Tabel 2.11
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2.216.684.761,77
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.216.684.761,77
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	337.162.553
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	504.999.655
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	730.155.978,77
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	617.366.659
	5	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	26.999.916
B	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		113.209.245,00
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	113.209.245,00
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	113.209.245,00
C	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		69.844.709,00
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	69.844.709,00
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	19.846.200,00
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	49.998.509,00
Jumlah			2.399.738.715,77

C. Urusan Penunjang Kesekretariatan :

- Dinas

Tabel 2.12
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Kesekretariatan Dinas

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.299.109.473
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.084.741
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.664.424
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.420.317
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.048.190.630
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.041.356.849
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.833.781
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.978.000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.978.000
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	997,342,042
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.993.061
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.747.836
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.854.105
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.040
	5	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000
	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	706.773.000
	9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.975.000
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.833.087
	1	Pengadaan Mebel	49.833.087
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.151.640
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.000.000
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.151.640
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.818.020

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.883.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	44.935.020
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
Jumlah			9.289.398.160

- **UPT. BLK**

Tabel 2.13
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Kesekretariatan UPT BLK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		353.711.313,00
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.759.903,00
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.963.488,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.488.623,00
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.945.203,00
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.958.589,00
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.404.000,00
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.441.410,00
	1	Pengadaan Mebel	34.563.059,00
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.878.351,00
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.850.000,00
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.850.000,00
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.660.000,00
	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.660.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		30.000.000,00
B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1.152.544.390,00
	1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		1.152.544.390,00
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Komptenesi		987.959.240,00
	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		10.400.000,00
	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		154.185.150,00
Jumlah				1.506.255.703,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini menyampaikan capaian kinerja sasaran dan hasil (outcome) yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2024.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari

indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Indikator Kinerja Utama SKPD

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikategorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikategorikan tidak terpenuhi.

Target dan Capaian IKU SKPD

Target dan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1
Target dan Capaian IKU SKPD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69%	73,03%	105,84%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Mennyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	3,6%	4,48%	124,44%

3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	81,55	83,90	102,88
---	--	-------------------------	-------	-------	--------

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian IKU SKPD Tahun 2021 s/d 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thp Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,27%	70,92%	96,82%	69%	73,03%	105,84	69%	0,65
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Menniyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	-63% -63	18,71%	18,36%	3,6%	4,5%	124%	4%	112%
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	76,16	83,2	81,55	81,55	83,9	102,88	85	98,71%

Capaian sasaran organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Berikut uraian dan analisa sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2024.

1. Sasaran 1 (Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja).

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”. Dalam memformulasikan TPAK, yang dihitung adalah jumlah Angkatan Kerja dibagi jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dikalikan 100%. Penghitungan TPAK ini berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia

$$. TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15thn keatas

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69%	73,03%	105,58%

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.27	70.92	96.82	69%	73,03%	105,8	69%	153,4%

Berdasarkan tabel diatas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 terealisasi sebesar 73,03% dari yang ditargetkan sebesar 69% atau dengan capaian indikator sebesar 105,8%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar 96,82% mengalami penurunan sebesar 23,79 point.

Sedangkan kalau dibandingkan dengan TPAK dengan kabupaten lain TPAK Kab. Tanah Laut berada pada peringkat 7 (tujuh) atau lebih rendah sebesar 0,43 point, dan dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Barito Kuala dengan realisasi 73,46% dan lebih tinggi sebesar 4,91 point dari TPAK Kabupaten Tapin dengan realisasi 68,12%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik sebesar 2,81 point, dimana TPAK Provinsi Kalimantan Selatan terealisasi sebesar 70,22%, dan dibandingkan dengan TPAK Nasional juga lebih baik sebesar 1,4 point dimana TPAK Nasional terealisasi sebesar 71,63%.

Berikut capaian TPAK nasional, Prov Kalsel dan 13 kab/kota di Prov Kalsel dari tahun 2022 s/d 2024 :

Tabel 3.5
TPAK Nasional, Prov. Kalsel dan Kab/Kota Prov. Kalsel

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		
	2024	2023	2022
NASIONAL	71,63	69,30	68,63
KALIMANTAN SELATAN	70,22	69,76	67,55
BALANGAN	76,91	73,16	72,54
HULU SUNGAI SELATAN	75,77	74,91	69,55
HULU SUNGAI TENGAH	74,53	71,97	67,63
TABALONG	74,17	72,94	72,32
HULU SUNGAI UTARA	73,89	75,34	69,35
BARITO KUALA	73,46	71,89	70,74

TANAH LAUT	73,03	69,61	70,92
BANJAR	71,03	70,21	69,91
TAPIN	68,12	70,17	70,31
TANAH BUMBU	67,35	68,57	64,75
KOTA BANJAR BARU	67,23	67,18	62,46
KOTABARU	65,8	64	63,96
KOTA BANJARMASIN	63,93	66,16	63,15

Sumber BPS Tanah Laut dan Prov. Kalsel

Berikut TPAK dan TPT Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK dan TPT Kab. Tanah Laut Tahun 2019 s/d Tahun 2024

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ANGKATAN KERJA (Orang)	172.161	181.817	185.049	184.133	185.267	198.160
BEKERJA (Orang)	166.334	175.337	178.543	176.458	178.635	191.362
PENGANGGURAN (Orang)	5.827	6.490	6.506	7.675	6.632	6.798
TPAK (%)	69.19	72,03	72,27	70,92	69,61	73,03
TPT (%)	3,38	3,57	3,52	4,17	3,58	3.43
PENDUDUK USIA 15th ke atas (orang)	248.819	252.428	256.054	259.629	266.148	271.330
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,62	96,44	96,48	95,83	96,42	96,57

Sumber BPS Tanah Laut dan Prov. Kalsel

Berdasarkan data BPS kabupaten Tanah Laut TPAK dan TPT Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam memaknai persentase TPAK yang tinggi perlu memperhatikan variabel berikut :

1. Pendidikan.

Implementasi dari program pendidikan dasar 12 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas angkatan kerja secara umum.

2. Usia.

Berdasarkan usia, maka TPAK untuk kelompok usia 15-19 tahun perlu diperhatikan supaya tetap rendah karena kelompok usia ini termasuk usia sekolah dan kategori anak.

3. Jenis kelamin.

Umumnya laki-laki lebih banyak terjun ke dunia kerja dibandingkan perempuan, dimana perempuan lebih mempertimbangkan pilihan sebagai ibu rumah tangga dibanding sebagai wanita karir.

Untuk mendukung sasaran ini maka didukung juga dengan 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator dari Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan 2 (dua) indikator lagi dari Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Indikator-indikator dan capaian tahun 2024 dapat dilihat sebagai tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Pendukung Sasaran 1

No	Indikator	2024			Penanggung Jawab
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase serapan serapan kerja yang terdaftar	24%	27,46%	114,42%	Bidang P2TK
2	Persentase pencari kerja yang kompeten	9%	9,1%	101,11%	
3	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	25%	89%	356%	Bidang HIJSTK
4	Persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan	40%	30,05%	75,13%	

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase serapan tenaga kerja yang terdaftar	24,30%	24%	27,46%	114,42%	24%	114,42%
2	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	13,8%	9%	9,2%	102,22%	9%	102,22%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	25%	89%	356%	32%	278%
		Persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan	34,73%	40%	30,05%	75,13%	40%	75,13%

Indikator pertama yang mendukung pada sasaran 1 yaitu **Persentase serapan Tenaga Kerja Yang Terdaftar *Pada tahun 2024*** dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 362 orang dari total pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.328 orang.

Indikator ini merupakan indikator positif, yang berarti semakin besar realisasi semakin bagus. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator **Persentase serapan Tenaga Kerja Yang Terdaftar *Pada tahun 2024*** yaitu sebesar 114,42%.

Kemudian jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya dimana tahun 2023 terserap sebesar 24,30% atau sebanyak 281 orang dari yg ditargetkan sebanyak 50 orang, maka tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 81 orang atau sebesar 128,82%.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Pendukung Ke 1

No	Sasaran	Indikator	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase serapan serapan kerja yang terdaftar	24%	27,46%	114,42%

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung Ke 1

No	Sasaran	Indikator	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase serapan tenaga kerja yang terdaftar	24,30%	24%	27,46%	114,42%	24%	114,42%

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Serapan Tenaga Kerja Yang Terdapat adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan}}{\text{Jumlah total pencari kerja di Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$$

Penyebab peningkatan penyerapan tenaga kerja ini antara lain adalah:

1. Meningkatnya kesadaran pihak Perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja yang mereka miliki sehingga memberi kesempatan yang besar bagi pencari kerja untuk mendaftar pada Perusahaan tersebut sehingga peluang untuk dapat diterima juga lebih besar.
2. Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas dan UPT Balai Latihan Kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuat tenaga kerja lebih siap untuk mengisi posisi yang tersedia di pasar kerja

3. Dilakukannya kegiatan sosialisasi untuk wirausaha baru yang mana akan memberi motivasi kepada pencari kerja untuk mencoba peluang dengan membuka wirausaha baru.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah diantaranya :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan dalam Penyusunan dokumen RTK Mikro. Dokumen ini akan disusun oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyusun rencana tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan .
2. Melakukan sosialisai mekanisme penempatan tenaga kerja kepada Perusahaan dengan tujuan membantu perusahaan memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penempatan tenaga kerja.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian agar mereka lebih siap memasuki dunia kerja, melakukan penjangkaran calon wirausaha baru melalui kegiatan Sinergitas Mitra Tala Preneur.

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah didukung dengan 2 program, 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 1

I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
	2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	b	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	3	Pelayanan antar Kerja
	4	Perluasan Kesempatan Kerja
	c	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	5	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
	d	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	6	Job Fair/Bursa Kerja
	e	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	7	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
	8	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan diatas yang sangat mendukung /menjadi prioritas pada indikator kinerja ini adalah:

1. Sub kegiatan pelayanan antar kerja:

Meningkatkan penempatan tenaga kerja di dunia usaha dan industri. pelayanan ini juga dapat membantu pencari kerja dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan pengalamannya, sedangkan bagi perusahaan mampu memperoleh tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang diperlukan. Pelayanan antar kerja merupakan bagian dari sistem antar kerja yang juga meliputi perantara kerja.

2. Sub kegiatan perluasan kesempatan kerja:

Dengan adanya lebih banyak kesempatan kerja, pencari kerja dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga mereka. Perluasan kesempatan kerja juga langsung berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran.

3. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kerja mikro, dengan adanya rencana tenaga kerja mikro, Perusahaan atau pemilik usaha dapat merencanakan penggunaan tenaga kerja dengan lebih efisien, memastikan bahwa setiap pekerjaan di dalam usaha mikro dilakukan oleh individu yang memiliki keterampilan yang sesuai. Dengan memahami kebutuhan tenaga kerja mikro (usaha kecil dan menengah), UPT Balai Latihan Kerja milik pemerintah dapat merancang program pelatihan yang lebih relevan dan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor mikro. Hal ini membantu memastikan bahwa tenaga kerja yang dilatih dapat langsung berkontribusi dalam sektor tersebut.

B. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan dalam melaksanakan indikator ini adalah :

1. Masih banyak Perusahaan yang belum memahami mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri, salah satunya adalah wajib lapor lowongan pekerjaan, sehingga masih minimnya informasi lowongan kerja dari perusahaanperusahaan
2. Memerlukan upaya yang kontinyu dalam pendampingan penyusunan perencanaan tenaga kerja mikro di perusahaan – perusahaan.
3. Masih maraknya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara unprosedural di Kab. Tanah Laut.

4. Kurang optimal koordinasi dari pihak desa ke peserta terkait kegiatan tentang kewirausahaan (MTP) tersebut sehingga Peserta latih dalam kegiatan Mitra Tala Preneur pada acara Manunggal Tuntung Pandang kurang tepat sasaran.
5. Minimnya pengetahuan pencari kerja terkait persiapan dalam memasuki dunia kerja.

C. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi ke Perusahaan terkait mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri.
2. Melakukan pendampingan dan pelatihan kepada Perusahaan-perusahaan terkait penyusunan rencana tenaga kerja mikro.
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pencari terkait prosedural bila ingin bekerja diluar negeri.
4. Memberikan himbauan dan arahan kepada aparat desa bahwa yang menjadi peserta dalam kegiatan Mitra Tala Preneur pada acara Manunggal Tuntung Pandang agar orang-orang yang memang membutuhkan pelatihan kerja, sehingga diharapkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, akan dapat membantu mengurangi beban ekonomi mereka.
5. Memberikan sosialisasi kepada pencari kerja terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja

D. Rencana Aksi 2025

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan di tahun depan adalah :

1. Akan terus dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi pemberi kerja. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan.
2. Akan terus dilakukan pendampingan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut pada Perusahaan untuk menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja mikro,
3. Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan kemudahan kesempatan kepada para pemberi kerja atau investor dalam berinvestasi yang kemudian akan menetapkan program perluasan kesempatan kerja dengan tujuan akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
4. Mendorong penempatan yang dilakukan di Bursa Kerja Khusus (BKK) tingkat Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan Kerja, serta di Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018).
5. Melakukan pembinaan dalam program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan

tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Indikator kedua pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja yang mendukung sasaran 1 (satu) adalah indikator “**Persentase Pencari Kerja Yang Kompeten**”. Pencari kerja yang kompeten ini dapat dilihat dari pencari kerja yang memiliki sertifikat Uji Kompetensi. Diharapkan dengan banyaknya pencari kerja yang kompeten maka dapat bersaing dengan pencari kerja dari luar Kabupaten Tanah Laut sehingga akan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.

Adapun cara menghitung persentase pencari kerja yang kompeten dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar yang memperoleh sertifikat}}{\text{jumlah total pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

$$\frac{122}{1.328} \times 100\% = 9,2\%$$

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Dengan Target Indikator Pendukung ke 2

Sasaran	Indikator	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	9%	9,2%	102,22%

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung ke 2

Sasaran	Indikator	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	13,8%	9%	9,2%	102,22%	9%	102,22%

Pada tahun 2024 realisasi capaian persentase pencari kerja yang kompeten dimana dari yang ditargetkan sebesar 9% atau sebanyak 119 orang dari jumlah total pencari kerja yang terdaftar yaitu sebanyak 1.328 orang, yang memiliki sertifikat Uji Kompetensi adalah sebanyak 122 orang yang terdiri dari 112 orang dari yang UJK pada BLK ditambah dengan 10 orang UJK pada dinas (pelatihan alat berat), sehingga capaian kinerja pada indikator Persentase pencari kerja yang kompeten ini sebesar 9,2%.

Dibandingkan dengan tahun 2023 dimana capaian persentase pencari kerja yang kompeten adalah sebesar 13,8%, karena jumlah pencari kerja tahun 2023 adalah lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 1156 orang sedang pencari kerja yang memiliki sertifikat Uji Kompetensi adalah lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 160 orang yang terdiri dari UJK dari BLK sebanyak 144 orang ditambah dengan UJK dari dinas yaitu sebanyak dari 16 orang (dari pelatihan alat berat), maka dibandingkan dengan tahun 2023 capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,7%. Penurunan ini disebabkan paket pelatihan pada tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2023, khususnya dari dana APBN, yang tahun sebelumnya mendapat 9 paket tahun 2024 hanya mendapat 7 paket pelatihan. Sedangkan pencari kerja yang terdaftar ditahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023, dengan kondisi tersebut maka yang pencari kerja yang memiliki setifikat Uji Kompetensi tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu.

Upaya-upaya dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan pelatihan/pemagangan baik yang diselenggarakan oleh dinas maupun yang diselenggarakan oleh BLK,

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun oleh BLK.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK sebanyak 12 paket pelatihan yang sumber dana dari APBD dan 7 paket pelatihan yang sumber dananya APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pelatihan dengan menggunakan APBD sebanyak 12 kejuruan :

- 1) Service Sepeda Motor Injeksi sebanyak 2 paket (pelaksanaan di BLK)
- 2) Perakitan Aluminium (pelaksanaan di BLK)
- 3) Pembuatan Roti dan Kue 2 paket (pelaksanaan di BLK dan Desa Ujung Baru)
- 4) Menjahit pakaian Wanita dewasa 1 paket (pelaksanaan di BLK)
- 5) Fillet Welder SMAW 2F/PB (pelaksanaan di BLK)
- 6) Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (pelaksanaan di BLK)
- 7) Videografi Dasar 2 paket (pelaksanaan di BLK)
- 8) Content Creator (pelaksanaan di BLK)
- 9) Operator Komputer Dasar (pelaksanaan di BLK)

Sedangkan pelatihan dengan menggunakan APBN sebanyak 7 paket :

- 1) Pembuatan Roti dan Kue 2 paket (pelaksanaan di BLK)
- 2) Menjahit pakaian Wanita dewasa (pelaksanaan di BLK)

- 3) Practical Office Advance (pelaksanaan di BLK)
- 4) Pemasangan instalasi otomasi Listrik industri (pelaksanaan di BLK)
- 5) Plate Welder AMAW 3G-UP PF (pelaksanaan di BLK)
- 6) Computer Operator Assintans (pelaksanaan di BLK)

Sedangkan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas adalah pelatihan alat berat yang bekerja sama dengan PT Alkon Best Mandiri Balikpapan, dimana tahun 2024 hanya diikuti oleh 10 peserta, ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan pelatihan yang sama jumlah peserta yang sebanyak 16 orang.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga telah melaksanakan kegiatan Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna dengan sumber dana APBD bagi 40 pencari kerja pada 5 perusahaan yaitu PT. Arutmin Indonesia Tambang Kintap, PT. PLN Indonesia Power UBP Asam-Asam, PT. Panen Embun Kemakmuran, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan PT. Wahyu Putra Ramadhan. Untuk pencari kerja dengan sumber dana APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan diikuti oleh 10 orang pencari kerja dengan jenis pelatihan PBK Institutional Boarding yang bertempat di PBK Boarding di BBPVP Bekasi, kemudian pemagangan dalam negeri yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dimana diikuti oleh 5 orang peserta bertempat di 2(dua) Perusahaan yaitu PT. Sinar Nusantara Industries dan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Tabel 3.15
Rekapitulasi Data Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja
Disnakerind Kab. Tanah Laut Tahun 2024

NO	LEMBAGA PENYELENGGARA	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA (Org)			JUMLAH KELULUSAN (Org)		SUMBER DANA	KETERANGAN
			L	P	JUMLAH	PELATIHAN / PEMAGANGAN	UJI KOMPETENSI		
1	BBPLK Kementerian Ketenagakerjaan RI	PBK Institutional Boarding	5	5	10	10	10	APBN	PBK Boarding di BBPVP Bekasi
2	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	PBK Boarding - Pelatihan Operator Alat Berat	9	1	10	10	10	APBD	Dilaksanakan oleh PT. Alkon Best Mandiri Balikpapan
3	BLK PELAIHARI	PBK Institutional non Boarding (Dana APBN)	43	69	112	112	112	APBN	7 Paket
		PBK Institutional non Boarding (Dana APBD)	111	81	192	192	0	APBD	12 Paket
		JUMLAH Pelatihan oleh BLK Pelaihari	154	150	304	304	112		
4	BLK KOMUNITAS	PBK Institutional Non Boarding	6	72	78	77	26	Mandiri	3 Paket Pelatihan BLK Komunitas Darussalam
5	LPK SWASTA	PBK Institutional Boarding	405	642	1047	1044	132	Mandiri dan Kerjasama	Selain kegiatan mandiri juga ada beberapa LPK yang melakukan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun swasta
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kal-Sel	Pemagangan dalam negeri	2	3	5	5	5	APBN	Pelaksananya Perusahaan di Kab. Tanah Laut (PT. Sinar Nusantara Industries dan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk)
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna	27	13	40	40	40	APBD	Pelaksananya PT. Arutmin Indonesia Tambang Kintap, PT. PLN Indonesia Power UBP Asam- Asam, PT. Panen Embun Kemakmuran, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan PT. Wahyu Putra Ramadhan
TOTAL			608	886	1494	1490	335		

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian indikator Persentase pencari kerja yang kompeten didukung dengan 1 (satu) program, 3 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
	b	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	c	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
	5	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, merupakan sub kegiatan yang prioritas, karena pada 2 (dua) sub kegiatan ini berkenaan dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pemagangan baik yang diselenggarakan oleh dinas maupun BLK serta berkaitan dengan peningkatan sarana pelatihan kerja di BLK, sedangkan di dinas peningkatan sarana pelatihan kerja pada Lembaga-lembaga pelatihan kerja dalam bentuk hibah. Dengan semakin banyak dana yang diberikan untuk 2 (dua) sub kegiatan diatas, maka semakin banyak juga pelatihan/pemagangan yang bisa diselenggarakan, serta semakin banyak juga sarana pelatihan kerja yang bisa ditingkatkan, baik untuk BLK ataupun yang dihibahkan kepada Lembaga pelatihan. Dengan demikian akan memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan/pemagangan yang ditawarkan,

dan akan menambah kualitas dari pada peserta pelatihan karena didukung dengan sarana pelatihan kerja yang baik.

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada 3 (tiga) sub kegiatan lainnya adalah sosialisasi terkait pengukuran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, monitoring ke Lembaga-lembaga pelatihan kerja, pelatihan peningkatan mutu dan pembinaan SDM LPK, Sosialisasi peningkatan kapasitas instruktur LPK, sosialisasi pembentukan LPK dan pelatihan di BLK Komunitas, Dengan kata lain 3 (tiga) sub kegiatan tersebut, focus kepada pembinaan Lembaga dan SDM LPK serta sosialisasi produktivitas tenaga kerja kepada Perusahaan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator Persentase pencari kerja yang kompeten adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya kejuruan pelatihan yang tersedia pada BLK.
2. Masih kurangnya jumlah instruktur sehingga jumlah paket pelatihan yang ditawarkan juga tidak banyak.
3. Masih kurangnya sarana pelatihan kerja yang tersedia, beberapa sarana pelatihan kerja usianya sudah cukup lama, sehingga dikhawatirkan akan menghambat pada pelaksanaan pelatihannya dan pelatihannya menjadi tidak maksimal.
4. Masih kurangnya jenis pelatihan/pemagangan yang dilaksanakan pada dinas.

C. Solusi

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kejuruan yang sekarang untuk tetap dibuka paket pelatihannya, walaupun ada keinginan untuk membuka kejuruan baru, karena melihat trend lowongan kerja yang banyak dicari oleh pencari kerja.
2. Memaksimalkan instruktur yang ada sesuai dengan kompetensinya dan kejuruan yang ada pada BLK, dengan menyesuaikan antara jumlah jam Pelajaran per paket pelatihan dan jumlah instruktur yang ada.
3. Memaksimalkan sarana pelatihan yang sudah ada, walaupun beberapa sarana pelatihan kerja yang sudah ditambah, tapi itu masih belum tercukupi dibandingkan dengan jumlah kejuruan yang ada.
4. Memaksimalkan pelatihan yang tahun sebelumnya juga sudah berjalan yaitu pelatihan operator alat berat, walaupun tahun 2024 ini mengalami penurunan jumlah peserta.

D. Rencana Aksi 2025

1. Mencoba untuk melakukan koordinasi dan peninjauan terkait rencana menambah kejuruan baru, melihat trend lowongan pekerjaan yang banyak diminati/diinginkan oleh pencari kerja sekarang ini, koordinasi dilakukan ke kemenaker, sehingga diharapkan dapat memberikan peluang/kesempatan kepada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan

sesuai dengan kompetensi pada lowongan pekerjaan yang mereka inginkan.

2. Mencoba untuk melakukan koordinasi ke BPKSDM Kab Tanah Laut maupun ke kemenaker terkait untuk menambah instruktur, mengingat instruktur yang ada sangat terbatas, juga koordinasi terkait peningkatan kompetensi instruktur.
3. Diupayakan setiap tahunnya bisa mendapat anggaran untuk penambahan sarana pelatihan kerja khususnya pada BLK Penganggaran untuk peningkatan sarana pelatihan kerja selalu dimasukkan dalam rencana kerja setiap tahunnya, sehingga diharapkan bisa diakomodir oleh pemerintah daerah melalui DPA SKPD.
4. Mencoba mencari terobosan baru dengan mencari pelatihan lain selain pelatihan alat berat, melakukan koordinasi dengan Lembaga pelatihan kerja lainnya dan yang berlokasi di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga mengurangi beban anggaran pemerintah daerah

Indikator ke 3 (tiga) yang mendukung sasaran 1 (satu) adalah indikator **“Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan”** yang ada pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Indikator ini dapat dilihat dari berapa banyak kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator pada Disnakerind sepanjang tahun 2024.

Adapun cara menghitung Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industri melalui mediasi}}{\text{Jumlah Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan}} \times 100$$

Tabel 3. 17
Perbandingan Realisasi Dengan Target Undukator Pendukung ke 3

Sasaran	Indikator	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	25%	89%	356%

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung ke 3

Sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
							Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	89%	100%	60%	80%	100%	25%	89%	356%	32%	64,75%

Pada tahun 2024 realisasi capaian Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dimana dari yang ditargetkan sebesar 25% atau sebanyak 3 kasus dari total seluruh kasus yang masuk yaitu sebanyak 9 kasus. Sedangkan yang dapat diselesaikan melalui mediator adalah sebanyak 8 kasus, sedangkan 1 kasus lainnya tidak bisa diselesaikan pada tahun berjalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dibandingkan antara realisasi dengan target maka capaian indikator ini mencapai 88,89%. Hal ini dikarenakan tahun 2024 dari total seluruh kasus

yang masuk, kasus yang bisa diselesaikan melebihi daripada yang ditargetkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024 yang capainya sebesar 356% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian 100%, maka capaian indikator Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengalami kenaikan sebesar 256%

Hal ini dikarenakan adanya penambahan terhadap kasus yang masuk terkait perselisihan hubungan industrial, dimana tahun 2023 kasus yang masuk sebanyak 4 kasus sedangkan tahun 2024 naik menjadi 9 kasus. Dengan banyaknya laporan kasus perselisihan yang diterima, menambah kegiatan bagi mediator untuk melakukan mediasi kepada yang berselisih antara pekerja dan Perusahaan.

Berikut disajikan data tahapan kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Tanah Laut rentang waktu 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 3.19
DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
PERIODE TAHUN 2024

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	TRIPARTIT (MEDIASI)	Anjuran Mediator	PB	
1	Sdr. Sopian Nor	PT. Sinar Nusantara Industries			V	Perjanjian Bersama
2	Sdr. Robi Darwis	PT. Sentosa Suksesutama			V	Perjanjian Bersama
3	Sdr. Danres Siahaan	PT. Darma Henwa		V		Anjuran Mediator/PHI
4	PT. Darma Henwa	Sdri. Diva Odilia		V		Anjuran Mediator/PHI
5	Sdr. Rendy Holfrizi	PT. Darma Henwa		V		Anjuran Mediator/PHI
6	Sdr. Ahmad Prayitno	CV. Wahyu Taruna Bakti		V		Anjuran Mediator/PHI
7	Sdr. Irwan Setiawan	PT. Darma Henwa		V		Anjuran Mediator/PHI
8	Sdr. Akhmad Basri dkk.	PT. Kintap Jaya Wattindo		V		Anjuran Mediator/PHI
9	Sdr. Budi Candra Sdr. Donny Saputra	PT. Darma Henwa	V			Proses Penjadwalan Mediasi
TOTAL			1	6	2	

Tabel 3.20

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Bo Atby Nuh	PT. Batu Mas Timur		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
2	Joko Supriyanto	PT. Finansia Multi Finance		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
3	H. Ashuri dkk.	PT. Bhakti Keluarga		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama (PB)
4	Mahyudin Fitri dkk	PT. Sinar Nirwana Sari		V		Selesai dengan Anjuran Mediator

Tabel 3.21

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific			V	Anjuran Mediator/PHI
2	Sdr. Harry Santoso	PT. Sinar Nirwana Sari		V		Perjanjian Bersama / Bekerja kembali
3	Sdr. Zainal Hakim (Perwakilan pekerja PT. SWA)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur			V	Anjuran Mediator/PHI
4	Sdr. Hartono dkk	PT. Sarana Subur Agrindotama		V		Anjuran Mediator/PHI
5	Sdri. Dewi Yana	PT. Mitra Citra Gemilang		V		Perjanjian Bersama

Tabel 3.22

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

Tabel 3.23

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Bahri Sdr. Normansyah	PT. Patriot Intan Abadi		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
2	Sdr. Joko Subandrio dkk	PT. Adidaya Alam Borneo PT. Surya Sakti Darma Kencana		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
3	Sdr. Mustamin	PT. Pribumi Citra Megah Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
4	Sdr. Yoyok Rudianto	PT. Darma Henwa			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
5	Sdr. Rusmadi dkk.	PT. Karya Wijaya Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
6	Sdr. Agus Rohendi dkk	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
7	Sdr. Chepy Eko Wahyudi	PT. Karya Wijaya Utama		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
8	Sdr. Fathorahman dkk	PT. Sinar Surya Jorong		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
9	Sdr. H. Ismail, SE, dkk.	PD. Baratala Tuntung Pandang		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama

Upaya-upaya dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan adalah melakukan sosialisasi kepada Perusahaan-perusahaan terkait aturan ketenagakerjaan dengan memberikan pemahaman tentang regulasi terbaru seperti aturan mengenai Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Selain melakukan kegiatan sosialisasi, kami juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Perusahaan – Perusahaan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ini kami dapat menerima data-data terkait ketenagakerjaan dan dengan data tersebut akan menjadi acuan dalam menerapkan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut.

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian indikator Persentase pencari kerja yang kompeten didukung dengan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 3

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	2	
I	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	a	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
	b	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota

Pada Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan fokus pada pelaksanaan sosialisasi kepada Perusahaan terkait peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan monitoring dan evaluasi yang menargetkan pengambilan data ketenagakerjaan pada Perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan pada sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota adalah melaksanakan pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit yang berfungsi sebagai wadah pembahasan dan perumusan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kepatuhan pelaku hubungan industrial terhadap peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan dalam pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya bagi masyarakat rentan.
2. Masih adanya beberapa perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan pihak Perusahaan.
3. Masih rendahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten.
4. Masih kurangnya ASN pada Bidang Hubungan Industrial diatas dengan didukung sehingga layanan yang diberikan masih belum optimal.

C. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas :

1. Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan menerbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintah Desa, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem, sebagai dasar dan pedoman dalam memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi masyarakat rentan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
2. Melalui dewan pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Tanah Laut dalam rangka Pengusulan Upah Minimum

Kabupaten (UMK) dan menyiapkan bahan perumusan pengembangan Sistem Pengupahan Kabupaten.

3. Memberikan layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja untuk mempersempit celah hukum dimana sering menjadi penyebab perselisihan hubungan industrial.
4. Harus membuka informasi kepada para pihak terkait akan pentingnya peraturan perusahaan.
5. Harus memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa kontrak kerja akan berakhir.
6. Memaksimalkan fungsi aplikasi siManja untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik.
7. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini.
8. Pembentukan dan mengoptimalisasian Lembaga Hubungan Industrial seperti Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit.

D. Rencana Aksi 2025

1. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;

2. Membuat sosialisasi ketenagakerjaan terkait urgensi pengesahan peraturan perusahaan yang dilaksanakan dan didanai penganggarnya melalui APBD tahun berjalan;
3. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
4. Mengoptimalisasikan kinerja Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Tanah Laut.

Indikator ke 4 (tiga) yang mendukung sasaran 1 (satu) adalah indikator **“Persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan”** yang juga ada pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Indikator ini dapat dilihat dari berapa tenaga kerja yang sudah terlindungi jaminan ketenagakerjaa/jamsostek.

Adapun cara menghitung Persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang terlindungi jamsostek}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kerja}} \times 100\%$$

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Dengan Target Indikator Pendukung ke 4

Sasaran	Indikator	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan	40%	30,05%	75,13%

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung ke 4

Sasaran	Indikator	2021	2022	2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra (2026)
					Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan	28,43%	35,6%	34,73%	40%	30,05%	75,13%	40%	22,87

Pada tahun 2024 realisasi capaian persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan dimana dari yang ditargetkan sebesar 40% atau sebanyak 26.559 orang dari jumlah seluruh tenaga kerja formal yaitu sebanyak 66.398 orang, hanya mampu terealisasi sebanyak 19.951 orang atau sebesar 30,05%. Maka jika dibandingkan antara realisasi dengan target yang ada, capaian kinerja indikator ini sebesar 75,13%.

Dibandingkan dengan tahun 2023 dimana capaian kinerja indikator persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan adalah sebesar 34,73%, dimana tahun 2023 tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan sebanyak 23.060 orang dari jumlah seluruh tenaga kerja formal yaitu sebanyak 66.398 orang, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,48% atau berkurang sebanyak 3.109 orang.

Penurunan ini disebabkan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja akibat iklim perekonomian yang tidak stabil sehingga kemudian secara otomatis akan menurunkan angka pekerja formal yang terlindungi karena jumlah keanggotaan pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan juga akan mengalami penurunan.

Upaya-upaya dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan terkait pentingnya memberikan

jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja mereka, sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja sesuai dengan yang diamanahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Juga melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui agen-agen perisai yang ada di setiap desa di kecamatan, untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat setempat perihal pentingnya jaminan ketenagakerjaan bagi mereka yang bekerja atau memiliki lapangan pekerjaan. Memasukkan anggaran jamsostek pada APBD bagi pekerja rentan dan Masyarakat miskin ekstrem, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban bagi mereka.

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian indikator Persentase pencari kerja yang kompeten didukung dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.27
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 4

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	2	
I	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	a	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pada indikator ini hanya ada 1 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja serta Pengupahan kegiatan tersebut, yang mana pada sub kegiatan ini adalah melakukan penyusunan aturan yang menetapkan penerima bantuan jamsostek, melakukan verifikasi data penerima bantuan jamsostek khususnya untuk pekerja rentan dan Masyarakat ekstrem, verifikasi ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dan BPJS Ketenagakerjaan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan yang telah dilakukan ke setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi indikator Persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten.
2. Masih kurangnya ASN pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga layanan yang diberikan masih belum optimal.
3. Masih belum seluruhnya terfasilitasi pembayaran BPJS bagi warga masyarakat rentan.

C. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi dengan sering melakukan pelaporan kondisi ketenagakerjaan baik lisan maupun melalui surat;
2. Meminta penambahan personil ASN baik PNS maupun P3K serta meminta peningkatan kapasitas melalui dukungan pelatihan dan diklat;
3. Memasukkan anggaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan pada APBD Kabupaten Tanah Laut melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

D. Rencana Aksi 2025

1. Melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi;
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas berupa pelatihan dan/atau diklat;
3. Memasukkan kembali anggaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan pada APBD Kabupaten Tanah Laut melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

2. Sasaran 2 (Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Menyokong Perekonomian Daerah).

Industri Kecil dan Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri pada dan oleh kalangan masyarakat menengah kebawah.

Kegiatan ini telah banyak digeluti oleh Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat didaerah pelosok karena kemudahannya yang tidak memerlukan sarana dan fasilitas berskala besar dalam menjalankan usahanya.

Dalam proses produksi, terutama industri IKM akan sangat membantu meningkatkan nilai tambah perekonomian Masyarakat.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi dan Target Sasaran 2

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Menniyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	3,6%	4,48%	124,4%

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi	Capaian		
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Menniyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	18,71%	18,36%	3,6%	4,47%	124,4%	4%	112%

Tabel 3.30
Pertumbuhan Nilai Produksi IKM Tahun 2022 s/d 2024

Tahun	Nilai Produksi (Rp)	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
2022	361.444.876.000	18,71
2023	427.820.241.000	18,36
2024	446.944.495.000	4,47

Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan nilai produksi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Produksi IKM tahun } N - \text{Nilai Produksi IKM tahun } N-1}{\text{Nilai Produksi IKM Tahun } N-1} \times 100\%$$

$$\frac{446.944.495.000 - 427.820.241.000}{427.820.241.000} \times 100\% = 4,47\%$$

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa persentase pertumbuhan nilai produksi IKM tahun 2024 terealisasi sebesar 4,47% atau sebesar Rp. 446.944.495.000 dari yang ditargetkan sebesar 3,6%. Realisasi yang dicapai melebihi dari yang ditargetkan, maka dapat dikatakan bahwa capaian indikator persentase pertumbuhan nilai produksi IKM adalah sebesar 124,4%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka pertumbuhan nilai produksi IKM tahun 2024 sudah stabil diangka 4,47 % atau sebesar Rp. 446.944.495.000, walaupun realisasi tahun 2024 itu lebih rendah dibanding dengan tahun 2023/2022, hal ini bukan karena penurunan produksi, namun produksi mengalami perlambatan, bisa dilihat dari nilai produksi yang naik dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena jumlah IKM 2022 ke 2023 mengalami kenaikan 800 unit IKM, sedangkan 2023 ke 2024 hanya 400 IKM. Hal ini terjadi karena setelah pandemi covid dunia usaha di Kabupaten Tanah Laut mengalami pemulihan dan peningkatan di 2023, dan kemudian mulai stabil di 2024. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan nilai produksi ikm adalah jumlah tenaga kerja, upah pekerja, biaya bahan bakar, biaya listrik, biaya bahan baku dan nilai investasi.

Tabel 3.31
Data Industri Kecil Dan Menengah Kumulatif Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Kab / Kota	Unit Usaha (Buah) kumulatif	Tenaga Kerja (ORG)	Nilai Investasi (Rp. 000)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai Bahan Baku (Rp. 000)
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Banjarmasin	3,559	33,182	1,406,854,157	3,131,782,678	2,250,859,965

2	Banjarbaru	2,997	12,194	475,392,007	534,367,923	293,677,148
3	Banjar	9,765	22,847	98,757,938	444,519,268	252,667,816
4	Tapin	7,478	14,433	45,537,257	194,225,290	101,796,306
5	Hulu Sungai Selatan	3,127	7,100	50,800,950	201,045,950	87,013,200
6	Hulu Sungai Tengah	4,451	8,140	27,453,257	408,074,936	65,148,508
7	Hulu Sungai Utara	18,571	35,940	99,022,744	591,131,167	416,153,902
8	Balangan	2,469	4,032	131,088,930	416,733,676	80,091,349
9	Tabalong	8,488	18,950	225,417,597	902,019,735	455,966,800
10	Barito Kuala	1,860	5,424	229,647,758	232,535,969	84,769,022
11	Tanah Laut	7,094	10,629	133,290,550	446,944,469	256,020,881
12	Tanah Bumbu	3,207	7,453	132,579,521	174,983,202	54,368,690
13	Kotabaru	2,364	4,758	875,244,524	237,785,792	250,633,640
Jumlah		75,430	185,082	3,931,087,190	7,916,150,054	4,649,167,228

Jika dibandingkan dengan nilai produksi Kab/Kota se Kalimantan Selatan, Tanah Laut menempati posisi urutan ke 4 untuk total jumlah Nilai Produksi.

Untuk mendukung sasaran 2 ini maka didukung dengan 5 (lima) indikator pada Bidang Perindustrian, yang mana realisasi tahun 2024 dan perbandingan capaian indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan IKM Yang Menerapkan Standarisasi Industri	Persentase IKM yang menerapkan standarisasi industri	3%	11,3%	377%
2	Meningkatkan Pengembangan Perw ilayahan Industri	Persentase Pengembangan Sentra IKM	33%	23%	69,7%
		Persentase Pengembangan Kaw asan Industri	6%	6,2%	103%
3	Meningkatkan Akses Pemasaran IKM	Persentase Akses Pemasaran IKM	16,83%	13,09%	78%
2	Meningkatnya Data pelaku Industri di SIIINas	Persentase Kepatuhan Industri Terhadap SIIINas	40%	37,99%	95%

Tabel 3.33

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatkan IKM Yang Menerapkan Standarisasi Industri	Persentase IKM yang menerapkan standarisasi industri	16,6%	3%	11,3%	377%	4%	298%
2	Meningkatkan Pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Sentra IKM	23%	33%	23%	69,70%	4%	575%
		Persentase Pengembangan Kawasan Industri	5,72%	6%	6,2%	103%	8%	77,50%
3	Meningkatkan Akses Pemasaran IKM	Persentase Akses Pemasaran IKM	18,28%	16,83%	13,09%	78%	17%	77%
2	Meningkatnya Data pelaku Industri di SILnas	Persentase Kepatuhan Industri Terhadap SILnas	25,7%	40%	37,99%	95%	42%	90,45%

Indikator Pertama pada Bidang Perindustrian yang mendukung sasaran 2 (dua) adalah indikator **“Persentase IKM yang menerapkan Standarisasi Industri”**. IKM yang menerapkan standarisasi ini adalah IKM yang telah mengikuti pelatihan, pemagangan, telah mendapatkan fasilitasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual, Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN), IKM yang mendapatkan layanan kemasan dan IKM yang mendapatkan bantuan hibah. Dengan terpenuhinya standarisasi produk ini maka diharapkan IKM dapat menaikkan nilai jual produk dan lebih berdaya saing.

Adapun cara menghitung persentase IKM yang menerapkan Standarisasi Industri dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan, magang, jumlah fasilitas (HKI, Halal, TKDN, Kemasan, Hibah)}}{\text{Jumlah IKM Formal}}$$

$$\frac{226}{1894} \times 100\% = 11,93\%$$

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Dengan Target Indikator Pendukung ke 1

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya IKM yang menerapkan Standaeisasi Industri	Persentase IKM yang menerapkan Standarisasi Industri	3%	11,93%	340%

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung ke 1

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya IKM yang menerapkan Standaeisasi Industri	Persentase IKM yang menerapkan Standarisasi Industri	16,6%	3%	11,93%	340%	4%	298%

Pada tahun 2024 realisasi persentase IKM yang menerapkan Standarisasi Industri adalah sebesar 11,67%. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana capaian mencapai 16,6 %. Hal ini dikarenakan jumlah IKM Formal pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 720 IKM dari jumlah IKM Formal tahun 2023 sehingga persentase kenaikan tidak sebanyak tahun sebelumnya walaupun secara jumlah IKM yang telah kita beri penguatan standarisasi pada tahun 2024 telah meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 31 orang. Data di tampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.36
Standarisasi IKM

	Tahun 2023	Tahun 2024
Peserta Pelatihan	110	125
Peserta Magang	5	10
Fasilitasi Hak Merek	3	23
Fasilitasi Halal	51	22
Fasilitasi layanan Kemasan	22	44
Fasilitasi TKDN	4	2
TOTAL	195	226
Jumlah IKM Formal	1174	1894

Upaya-upaya dilakukan pada indikator ini adalah dengan melaksanakan pelatihan dan pemagangan bagi IKM dan memberikan

pendampingan/ fasilitasi Sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual, Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN), serta layanan kemasan dan memberikan bantuan hibah bagi IKM.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri berperan besar dalam pencapaian target indikator. Adapun rincian kegiatan tahun 2024 sbb :

1. Pelatihan Teknis Produksi Sasirangan Ringkel Tuntung Pandang 29 April s.d 3 Mei 2024 Desa Jorong Kecamatan Jorong dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari IKM Yazidan Sasirangan.
2. Pelatihan Teknis Produksi Pengolahan Hasil Pertanian 27 s.d 31 Mei 2024 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari BBSPJI Agro Kemenperin, Bogor
3. Pelatihan Peningkatan IKM Berbasis IT 10 s.d 14 Juni 2024 dan Tanggal 22 s.d 26 Juli 2024 bertempat Gedung Pusat Promosi IKM Tambang Ulang dengan jumlah peserta per pelatihan 10 orang dengan instruktur berasal dari Tenaga Ahli Penyuluh Perindustrian Kab. Tanah Laut.
4. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Teknis Pembuatan Kopiah Tuntung Pandang 8 s.d 12 Juli 2024 dengan jumlah peserta 20 orang Gedung Pusat Promosi IKM Tambang Ulang berasal dari CV. Peci Batik Jogokariyan, Yogyakarta.

5. Pelaksanaan Lomba Cipta Produk Olahan Unggulan Kabupaten Tanah Laut Tanggal 12 September 2024 bertempat di Balaiung Tuntung Pandang Pelaihari diikuti 27 Peserta.
6. Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Produk Fashion Unggulan Tanah Laut 19 s.d 23 Oktober 2024 peserta 20 orang Gedung Pusat Promosi IKM Tambang Ulang instruktur berasal dari Almira Handmade, Malang.
7. Pelaksanaan Fotografi dan Animasi Produk IKM 28 Oktober s.d 2 November 2024 peserta 20 orang Gedung Pusat Promosi IKM Tambang Ulang instruktur berasal dari CV. Orca Tech.
8. Pelatihan pembuatan mesin Transplanter Tenaga Listrik oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah peserta 5 orang bertempat di Desa Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar.
9. Magang IKM Pengolahan Hasil Perikanan di BBSPJIA Bogor 4 s.d 8 Maret 2024
10. Pelaksanaan Magang Teknologi Kemasan Makanan dan Minuman di BBSPJIKFK Jakarta 16 s.d 20 September 2024

Tabel 3.37
Rekap Data IKM Yang Di Fasilitas Sertifikasi Merek Tahun 2024

NO	NAMA IKM	DESA	KECAMATAN	NAMA MEREK	KELAS	PRODUKSI
1	Ade Ratna Ningsih	Bajuin	Bajuin	Ibu Ade	30	rengginang, keripik
2	Herwin Eko Baskoro	Karang Taruna	Pelaihari	C3	1	Sediaan kimia (pembersih)
3	Rina	Tanjung Dewa	Panyipatan	Duitri	30	Kerupuk ikan/udang
4	Winarsih	Martadah baru	Tambang Ulang	Ferariaputri Sasirangan	24	Kain Sasirangan
5	Jamilah	Asam Jaya	Jorong	JBS	24	Kain Sasirangan
6	Muihammad Sabil Mubtadin	Pagatan Besar	Takisung	Riani	30	Amplang, Kerupuk ikan dan udang

7	Ratri Suryani	Karang taruna	Pelaihari	Two'Al	30	seduhan herbal dan kue
8	Novi Yanti Maulida	Karang taruna	Pelaihari	Mama Ikul	30	Roti dan kue
9	Air Langga	Sarang Halang	Pelaihari	AA	35	MEUBELER
10	Riyanah	Angsau	Pelaihari	Jamu Eknaldi	5	Jamu
11	Misbah	Ranggang Dalam	Takisung	Lahang Rizkimisbah	30	ekstrak Nira, gula aren
12	Momo Aris Sumaryana	Pemuda	Pelaihari	Motekar	29	Makanan Ringan bahan sayurandan buah, keripik dan manisan buah
13	Amelia Rizki Okmalasari	Gunung Makmur	Takisung	Okmalasari	30	kue dan roti
14	Siti Aisah	Kampung Baru	Pelaihari	Wirani	29	Aneka keripik
15	Suhartin	Tirtajaya	Bajuin	Harismagor	29	Aneka keripik
16	Nurwulan	Telaga Langsung	Takisung	morievera	29 dan 30	Mie, stick, puding daun kelor
17	Ainun Jariah	Handil Babirik	Bumi Makmur	A6 collection	24	Kain, kaos sasirangan
18	Yunda Arianti	Karang Taruna	Pelaihari	Borneo'hijab	25	Jilbab, dalaman, mukana
19	Zaitunnisa	Bluru	Batu Ampar	Chokobindo	30	Coklat, Biskuit
20	Nurhasanah	Asam Jaya	Jorong	Kerupuik Mang Ali	30	Kerupuk
21	Herry Winardi	Atu Atu	Pelaihari	Oomdyah	29	Bandeng presto, olahan ikan, daging, unggas, sayuran
22	Anang Eko Wahyudi	Benua Lawas	Takisung	PureNira 88	30	ekstrak Nira, gula aren
23	Ririn Wulandari	Tirtajaya	Bajuin	Mama El	30	Aneka Sambal

Pada tahun 2024, total 21 IKM yang kita fasilitasi Sistem Jaminan Halal, dengan rincian sebanyak 14 IKM Pangan yang difasilitasi melalui Self Delcare dan sebanyak 4 IKM difasilitasi melalui Dana APBD Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dan 3 IKM Dana LPPOM

Kalimantan Selatan. sebagaimana yang terinci pada table berikut :

Tabel 3.38
Daftar IKM Yang Difasilitasi Sistem Jaminan Halal
Dengan bekerjasama dengan BPJPH, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dan LPPOM
Kalimantan Selatan

NO	NAMA IKM	Merk	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN	NOMOR SERTIFIKAT HALAL
1	Ikan Asap Raja	Ikan Asap Raja	Yana Sripurwati	Komplek Mahkota Panggung Blok. A RT.006B/RW.002, Desa Panggung, Kab. Tanah Laut	Aneka Ikan Asap	No. Sertifikat Halal: ID631100136908012 23
2	Bolu Sukses Tamara	Bolu Sukses Tamara	Endang Purwati	Jalan Pusaka No.34, Desa Kintap RT.001/RW.001	Aneka Bolu	No. Sertifikat Halal: ID631100128755310 23
3	Pawon Mlaku Si Suki	Pawon Mlaku Si Suki	Haryoto	Jalan Jaya No.65 RT.004/RW.002, Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	Sambal Bawang	No. Sertifikat Halal: ID631100136907012 23
4	Dapur Mama Aqilla	Dapur Mama Aqilla	Megawati	Ds. Handil Gayam RT.005/RW.003, Kec. Bumi Makmur	Telur Asin	No. Sertifikat Halal: ID631100149504912 23
5	Dapur Mama Aqilla	Dapur Mama Aqilla	Megawati	Ds. Handil Gayam RT.005/RW.003, Kec. Bumi Makmur	Kacang Gula Merah dan Rempeyek Kacang Tanah	No. Sertifikat Halal: ID631100149505112 23
6	Agung Cake & Cookies	Agung Cake & Cookies	Muliana	Gg Sabrina Komplek Langgeng Citra Persada RT.007/RW.002, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-Bati	Aneka Cake & Cookies	No. Sertifikat Halal: ID631100148550812 23
7	Sumber Madu	Sumber Madu	Sugeng	Rombongan 4, Desa Sumber Madu, Kec. Takisung	Madu Kelulut	No. Sertifikat Halal: ID631100141637312 23
8	Tzd Madu	Tzd Madu	Suwarsono	Rombongan 4, RT.008/RW.004, Desa Sumber Madu, Kec. Takisung	Madu Kelulut	No. Sertifikat Halal: ID631100139696101 24
9	Ulya Madu	Ulya Madu	Ahmad Sholeh	Rombongan 4, RT.011/RW.005, Desa Sumber Madu, Kec. Takisung	Madu Kelulut	No. Sertifikat Halal: ID631100142102912 23
10	ARC Madu	ARC Madu	Joko Melasi	Rombongan 4, Desa Sumber Madu, Kec. Takisung	Madu Kelulut	No. Sertifikat Halal: ID631100142102512 23

11	Nini Agisna	Nini Agisna	Saiyah	Ds. Handil Gayam RT.002/RW.001, Kec. Bumi Makmur	Akar Pinang	No. Sertifikat Halal: ID631100149401312 23
12	Nini Agisna	Nini Agisna	Saiyah	Ds. Handil Gayam RT.002/RW.001, Kec. Bumi Makmur	Roti Sobek	No. Sertifikat Halal: ID631100149401012 23
13	Kin's Kitchen	Kin's Kitchen	Sri Wulandari	Komplek Shakela Permata Blok 6 No.68, RT/RW-, Sarang Halang	Kue Kering	No. Sertifikat Halal: ID631100126566709 23
14	Asian Streetfood	Asian Streetfood	Fahruzzaini	JL. DATU DAIM RT 028 RW 002, RT/RW-, PELAIHARI	Produk Bakeri (donat, bolu/ cheesecake, cookies)	No. Sertifikat Halal: ID631100159778110 23
15	Chocobiindo	Chocobiindo	Zaitun Nisa	Bedakan E2, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	Produk Bakeri (Cokelat Biskuit, Bolu)	No. Sertifikat Halal: ID631100207468510 24
16	Mak Ayu	Mak Ayu	Wahyu Gladi Eny	Jl. Telaga Daim Perumahan Griya Cahaya Asri KV.C-7 RT.03 Rw.01 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	Produk Bakeri (Kue kering, fruitsando, donat, dll)	No. Sertifikat Halal: ID631100208384811 24
17	Mama El	Joytek	Ririn Wulandari	Jl. Harapan RT.10/002, Desa Tirtajaya, Kec. Bajuin	Sambal Kemasan	No. Sertifikat Halal: ID631100206967910 24
18	Cokelat Ceria Bakery & Cake	Cokelat Ceria	Auliana Prasetya Nurrozi	Jln. A.Yani, Gg. Mufakat, RT. 10, RW. 04, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	Produk Bakeri (roti manis isi)	No. Sertifikat Halal: ID631100189630607 24
19	Byhaf	Byhaf	Yulia Purnama Rukmi	Jl. Merdeka RT. 03/01 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin	VCO dan Produk Susu (Yogurt dan Kefir Probio)	No. Sertifikat Halal: ID631100027627604 23 (VCO) ID631100189631907 24 (Yogurt dan Kefir)
20	Milano Hana's Jaya	Dua Mawar	Nur Laila Hayati	Jl. A. Yani RT.005 RW.001 Desa Panggung, Kec. Pelaihari	Produk Bakeri (Bolu dan lapis Surabaya) dan Sirup	No. Sertifikat Halal: ID631100208319310 24 (Bakeri) ID631100185401006 24 (Sirup)
21	D'ncef	D'ncef	Hijria Septi Anggraini	Jl. KH. Mansyur RT. 14 Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Kue Basah, Gorengan, Bolu	Masih dalam proses pengajuan di BPJPH

Dalam mendorong Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN), Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah

Laut memfasilitasi IKM untuk memperoleh Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Kecil (TKDN IK) dengan total sebanyak 2 IKM yang difasilitasi melalui aplikasi SIINas Kementerian Perindustrian RI sebagaimana yang terinci pada tabel berikut :

Tabel 3.39
Rekap IKM yang Memperoleh Sertifikat TKDN IK

NO	NAMA IKM	Jenis Produk	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KET
1	Feraria Putri Sasirangan	Kain Sasirangan	Winarsih	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	38%
2	Kunyit Sasirangan	Kain Sasirangan dan turunannya	Marsita emiliasani	Desa Kunyit, Kec. Bajuin	40%

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut juga berusaha meningkatkan pelayanan di Rumah Kemasan dengan cara memfasilitasi desain label dan kemasan sebanyak 44 IKM di Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.40
Rekap Pelayanan Pada Rumah Kemasan

No.	Nama IKM Pengguna Layanan	Layanan yang diterima	No. HP (WA)
1	Mama Salma	Desain label kemasan kue basah, kue kering, jamu, tape ketan, kembang goyang	85345102864
2	SJ Langkar	Desain Label kemasan Pangsit Ikan tenggiri, Pentol ikan tenggiri, Takoyaki ikan tenggiri, Tahu bakso ikan tenggiri	
3	Riana Catering	Desain Label kemasan Catering	82353105233
4	Nuryati Farm	Desain Label kemasan Buah Anggur	85251475152
5	Mama EL	Desain Label Kemasan Olahan Cumi	
6	TE-WANG	Desain Label Kemasan Keripik Tempe	85391910256
7	Jaya Bersama Sasirangan	Desain Label Kemasan Sasirangan	82250249500
8	Asura	Desain Label Kemasan Minuman Rambai	82251138764

9	Lele Ruli	Desain Label kemasan Olahan Kerupuk ikan dan abon ikan lele	82250328111
10	Tala Al Plus	Desain Label Kemasan Ubi Segar	85753164483
11	ARC Madu	Desain Label Kemasan Madu Kelulut	85346541271
12	TZD Madu	Desain Label Kemasan Madu Kelulut	85248291002
13	Ulya Madu	Desain Label Kemasan Madu Kelulut	85332374856
14	Acil Jasimah	Desain Label Kemasan Olahan Udang	
15	Mang Ali	Desain Label kemasan Kerupuk	82227882599
16	Noviana	Desain Label Kemasan Pempek	
17	Batakan Berkah	Desain Label kemasan Pangsit Ikan tenggiri, Pentol ikan tenggiri, Takoyaki ikan tenggiri, Tahu bakso ikan tenggiri	
18	Amalia	Desain Label kemasan olahan Rambai	82251138764
19	Hani Fresh Milk	Desain Label kemasan Susu segar	
20	Injon	Desain Label kemasan Kerupuk Labu	
21	TPA Darul Qur'an	Desain Logo TPA	
22	Ibu Ade	Desain Label kemasan Aneka Camilan	
23	Ahmadi	Desain Label kemasan Temulawak Sebuk	85821375848
24	Agung Cake and Cookies	Desain Label kemasan kue	85348262688
25	Berkah Sasirangan Bajuin	Desain Label Produk Sasirangan	85348251592
26	IKM Desa Ujung Baru	Desain Label Kemasan Cake singkong, cake labu, dodol labu, minuman jeruk serbuk, carica papaya, manisan papaya, carica kundur, manisan kundur, selai pepaya, selai kundur, kue gipang, saos pepaya	
27	Norsuhad	Konsultasi Kemasan produk IKM	
28	Ningrum	Konsultasi Kemasan produk IKM	87814147227
29	Diah R	Konsultasi Kemasan produk IKM	85260517553
30	Aditya Pratama	Konsultasi Kemasan produk IKM	82157200681
31	Mohmudin	Konsultasi Kemasan produk IKM	82153024925
32	Lasti	Konsultasi Kemasan produk IKM	81150334345
33	Mariati	Konsultasi Kemasan produk IKM	
34	Amalia	Konsultasi Kemasan produk IKM	

35	IKM Roti Gunung Makmur	Konsultasi Kemasan produk IKM	
37	Amel	Konsultasi Kemasan produk IKM	82149858959
38	Norma	Konsultasi Kemasan produk IKM	82151418969
39	Mama Zeva	Desain Label Kemasan Produk Kerupuk Udang	85251527605
40	Gorengan Purnama	Desain Label Kemasan Produk Gorengan	85346433519
41	Telur Asin Andut	Desain Label Kemasan Produk Telur Asin	82153097565
42	UPPKA Desa alur	Konsultasi Kemasan produk Jamu dan Telur Asin	81347073741
43	Dapoer nini kembar	Konsultasi Kemasan Produk Kacang Sembunyi	85332244022
44	Sasirangan KA' MCE	Desain Motif Sasirangan	85332474556

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian indikator Persentase IKM Yang Menerapkan Standarisasi Industri didukung dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.41
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri merupakan sub kegiatan yang prioritas, karena pada 2 (dua) sub kegiatan ini berkenaan dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

pelatihan, magang serta penganggaran fasilitasi bagi IKM serta pemberian hibah.

Dengan semakin banyak dana yang diberikan untuk 2 (dua) sub kegiatan diatas, maka semakin banyak juga pelatihan/pemagangan yang bisa diselenggarakan, serta semakin banyak juga fasilitasi bagi IKM yang bisa ditingkatkan. Dengan demikian akan memberikan efek positif bagi peningkatan daya saing produk IKM.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain :

1. Belum maksimalnya Rumah Kemasan dalam membantu IKM memperbaiki kualitas produknya dimana penyebab salah satunya karena tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat dimana dana DAK hanya bagi Daerah Prioritas Pariwisata, sehingga Tanah Laut tidak dapat mengajukan permohonan dana tersebut untuk pengembangan rumah kemasan, baik untuk pembelian mesin peralatan maupun pembangunan workshop, pengembangan rumah kemasan hanya melalui dana APBD yang anggaran terbatas.
2. Tidak adanya Dana Intensif Daerah (DID) dimana untuk dana DID, dimana pada tahun 2021 Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut mendapatkan dana DID dan dialokasikan untuk fasilitasi Hak Merek, Halal maupun pembelian mesin peralatan bagi IKM dan juga pembelian mobil promosi. Karena tahun 2024 ini tidak dapat, maka target kami untuk fasilitasi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN) hanya bisa kami laksanakan dengan mekanisme self declare.

3. Kurangnya jumlah kegiatan pelatihan peningkatan wirausaha baru.

C. Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya tambahan mesin dan peralatan pada Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya, maka Disnakerind akan mendorong Pemkab dan Pemrov agar Tanah Laut masuk menjadi Daerah Prioritas Pariwisata, serta sounding ke kementrian agar kebijakan DAK dapat direvisi.
2. Mendorong Bappeda dan TAPD agar Disnakerind mendapatkan alokasi DID yang dapat kami manfaatkan untuk standarisasi produk IKM.
3. Dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan industri serta fasilitasi penerapan teknologi bagi IKM di Kabupaten Tanah Laut.

D. Rencana Aksi 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan diatas maka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan ke Kementrian Perindustrian mengenai perubahan regulasi mengenai kebijakan Daerah Khusus Pariwisata, sehingga Tanah Laut dapat mendapatkan dana DAK untuk membangun ruang produksi/workshop.
2. Mengajukan usul penambahan anggaran untuk pembuatan workshop Rumah kemasan.
3. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.
4. Mendorong sertifikasi TKDN Industri Kecil, Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Hak Merek bagi Industri Kecil
5. Peningkatan pelayanan desain produk di Rumah Kemasan.

Indikator Kedua pada Bidang Perindustrian yang mendukung sasaran 2 (dua) adalah indikator **“Persentase Pengembangan Sentra IKM”**. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Di Kab. Tanah Laut, Sentra IKM berjumlah 13 Sentra dengan rincian sbb :

1. Sentra IKM Sasirangan di Desa Martadah Baru
2. Sentra IKM Arang Kayu di Desa Ranggange

3. Sentra IKM Anyaman Purun di Desa Takisung
4. Sentra IKM Anyaman Purun di Desa Liang Anggang
5. Sentra IKM Gula Merah di Desa Kandangan Lama
6. Sentra IKM Gula Merah di Desa Batilai
7. Sentra IKM Madu di Desa Sumber Makmur
8. Sentra Olahan Hasil Laut di Desa Tanjung Dewa
9. Sentra Olahan Hasil Laut di Desa Batajang
10. Sentra Olahan Hasil Laut di Desa Sungai Rasau
11. Sentra Pakasam, Desa Kali Besar
12. Sentra Makanan dan Minuman di Desa Bumi Jaya
13. Sentra Makanan dan Minuman di Desa Tirta Jaya

Pada Tahun 2024 ada 2 sentra yang ditetapkan melalui SK Bupati Tanah Laut yaitu Sentra Madu dan Sentra Sasirangan di Desa Martadah Baru. Sedangkan pada Tahun sebelumnya ada 2 Sentra yang ditetapkan yaitu Sentra Olahan Hasil Laut dan Sentra Sasirangan.

Adapun cara menghitung persentase **Persentase Pengembangan Sentra IKM** dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah total sentra yang ditetapkan}}{\text{Jumlah total sentra}}$$

$$\frac{3}{13} \times 100\% = 23 \%$$

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Dengan Target Indikator Pendukung ke 2

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Sentra IKM	33%	23%	69,70%

Tabel 3.43
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indikator Pendukung 2

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Sentra IKM	23%	33%	58,3%	177%	4%	145%

Pada tahun 2024 realisasi Persentase Pengembangan Sentra IKM adalah sebesar 58,3%. Nilai ini mengalami kenaikan dibanding dari tahun sebelumnya dimana capaian mencapai 176%. Hal ini dikarenakan jumlah pengelola Sentra yang dilatih mencapai 5 orang. Untuk jumlah Sentra pada Tahun 2024 berjumlah 13 sentra. Data di tampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.44
Jumlah Sentra IKM Tahun 2024

	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Sentra	2	2
Pengelola Sentra yang Dilatih	1. Tirta Jaya	1. Sasirangan 2. Tanjung Dewa 2x 3. Batilai 4. Martadah Baru

Upaya-upaya dilakukan pada indikator ini adalah dengan menetapkan sentra serta melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi Sentra dan Pengelola Sentra agar mereka mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang cukup..

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri yang

berperan besar dalam pencapaian target indikator. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung indikator tersebut adalah :

1. Pelatihan Peningkatan IKM Berbasis IT 10 s.d 14 Juni 2024 dan Tanggal 22 s.d 26 Juli 2024 bertempat Gedung Pusat Promosi IKM Tambang Ulang dengan jumlah peserta per pelatihan 10 orang dengan instruktur berasal dari Tenaga Ahli Penyuluh Perindustrian Kab. Tanah Laut.
2. Sosialisasi Sentra IKM Olahan Hasil Laut di Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan.

A. Program Dan Kegiatan

Pada indikator Persentase Pengembangan Sentra IKM didukung dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.45
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri merupakan sub kegiatan yang prioritas, karena pada 2 (dua) sub kegiatan ini berkenaan dengan

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sosialisasi berkenaan dengan Sentra IKM.

Dengan semakin banyak dana yang diberikan untuk 2 (dua) sub kegiatan diatas, maka semakin banyak juga pelatihan dan Sosialisasi yang dapat kita berikan dalam rangka memperkuat sentra dalam aspek kelembagaan maupun manajemen sentra.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain :

1. Untuk kelembagaan Sentra masih terkendala dengan adanya perbedaan pandangan antara kelompok yang ada didesa tersebut untuk memilih lembaga pengelola sentra antara BUMDES/Koperasi/Swasta atau Kelompok IKM.
2. Sosialisasi dan pelatihan Sentra dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas.

C. Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu dengan meningkatkan jumlah pelatihan dan sosialisasi ke sentra-sentra agar pemahaman masyarakat terhadap sentra baik dari segi manajemen dan kelembagaannya sehingga kita dapat menciptakan sentra IKM yang berdaya saing.

D. Rencana Aksi 2025

Bahwa sesuai dengan saran yang kami ajukan maka kami pada tahun 2025 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang ada di desa-desa untuk menambah wawasan dan pemahaman mereka terkait pengelolaan IKM.
2. Melaksanakan pembinaan terhadap sentra IKM yang sudah ada sehingga IKM-IKM tersebut bisa lebih berkembang.



Indikator Ketiga pada Bidang Perindustrian yang mendukung sasaran 2 (dua) adalah indikator “**Persentase Pengembangan Kawasan Industri**”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, Kawasan Industri adalah Kawasan tempat Pemusatan Kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Dalam Hal ini Kabupaten Tanah Laut memiliki Kawasan Industri Jorong seluas 957,72 Ha yang dikelola oleh PT. Wahyu Putra Ramadhan dengan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang terbit pada Tanggal 3 April 2024. Adapun

kepemilikan lahan PT. WPR di kawasan Industri saat ini mencapai 60 Ha dari total 958 luas Kawasan Industri.

Persentase Pengembangan Kawasan Industri dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah lahan yang dikelola pada phase 1}}{\text{Jumlah lahan KI}} \times 100\%$$

$$\frac{60}{957,72} \times 100\% = 6,2 \%$$

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Dengan Target Indikator Pendukung ke 3

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Kawasan Industri	6%	6,2%	103%

Tabel 3.47
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indikator Pendukung ke 3

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Kawasan Industri	5,72%	6%	6,2%	103%	8%	77,5%

Pada tahun 2024 realisasi Persentase Pengembangan Kawasan Industri adalah sebesar 6,2%. Nilai ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dimana realisasi sebesar 5,72%. Hal ini dikarenakan jumlah lahan yang dimiliki pengelola pada tahun 2023 seluas 55 Ha dan pada tahun 2024 seluas 60 Ha.

Tabel 3.48
Luas Lahan Yang Dimiliki

	2023	2024
Luas lahan yang dikelola	55 Ha	60 Ha
Jumlah lahan KI	957,72	957,72

Upaya-upaya dilakukan pada indikator ini adalah dengan sosialisasi dan promosi mengenai Kawasan Industri agar pengelola dan calon investor memiliki informasi yang cukup mengenai tata cara pengelolaan kawasan maupun progress dari Kawasan Industri.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri berperan besar dalam pencapaian target indikator. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung indikator tersebut adalah :

1. Sosialisasi Promosi Kawasan Industri Jorong dilaksanakan pada Tanggal 30 Oktober 2024 di Novotel Banjarbaru.
2. Rapat Evaluasi Kawasan Industri Jorong dilaksanakan Tanggal 13 Desember 2024 di Algoritma Resto, Pelayari.

A. Program dan Kegiatan

Pada indikator Persentase Pengembangan Kawasan Industri didukung dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.49
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 3

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri merupakan sub kegiatan yang prioritas, karena pada 1 (satu) sub kegiatan ini berkenaan dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, promosi dan evaluasi Kawasan Industri Jorong.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024, kendala antara lain :

1. Masalah Pelabuhan dimana statusnya masih pengumpan lokal dan perlu dinaikkan menjadi pengumpul, dengan memenuhi infrastruktur yang dipersyaratkan.
2. Ketersediaan air bersih masih menjadi kendala bagi supply Kawasan Industri.

C. Solusi

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi diatas maka Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi ke Kementerian Perhubungan agar dapat meninjau dan menaikkan status pelabuhan yang ada untuk memenuhi ketentuan. Melakukan koordinasi antara Pemkab Tanah Laut dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan embung di Asam-Asam dan di Kintap sesuai dengan usulan yang telah disampaikan.

D. Rencana Aksi 2025

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ditahun 2025 adalah yaitu melakukan konsultasi ke Kementerian Perwilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR terkait kebutuhan dasar Kawasan Industri Jorong.





VERIFIKASI IUKI OLEH KEMENPERIN, BKPM DAN PEMDA TANAH LAUT

Tim kawasan industri jorong (PT WPR) melakukan koordinasi dengan Kemenperin, BKPM dan Pemda Tanah Laut untuk proses verifikasi IUKI Kawasan Industri Jorong untuk selanjutnya di terbitkan IUKI.



28 Maret 2024



Indikator Keempat pada Bidang Perindustrian yang mendukung sasaran 1 (satu) adalah indikator **“Persentase Akses Pemasaran IKM”**. Persentase akses pemasaran ini terdiri dari jumlah IKM yang dipromosikan ditambah jumlah IKM yang bermitra.

Adapun cara menghitung persentase IKM yang menerapkan Standarisasi Industri dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Ikm yang dipromosikan} + \text{Jumlah Ikm yang bermitra}}{\text{Jumlah IKM formal}}$$

$$\frac{248}{1894} \times 100\% = 13,09 \%$$

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi Dengan Target Indikator Pendukung ke 4

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Pemasaran IKM	Persentase akses pemasaran IKM	16,9	13,09	81,81

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung ke 4

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Akses Pemasaran IKM	Persentase akses pemasaran IKM	18,28%	16%	13,09%	81,81	17%	77%

Pada tahun 2024 realisasi persentase Akses Pemasaran IKM adalah sebesar 13,09% Hal ini mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya dikarenakan jumlah IKM formal di Tahun 2024 bertambah sebanyak 720 unit dibanding Tahun 2023. Sedangkan untuk jumlah IKM yang dipromosikan Tahun 2024 bertambah 34 unit di bandingkan Tahun 2023.

Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.52
Jumlah IKM Yang Dipromosikan

	Tahun 2023	Tahun 2024
IKM yang dipromosikan di Dekranasda	55	64
IKM yang dipromosikan di Puspro Tambang Ulang	50	59
IKM yang dipromosikan melalui Mobil Promosi	48	64
IKM yang di promosikan melalui even-even pameran yang diikuti baik dalam daerah maupun luar daerah	13	13
IKM yang dipromosikan melalui Pojok IKM	48	48
TOTAL	214	248

Jumlah IKM Formal	1174	1894
-------------------	------	------

Upaya-upaya dilakukan pada indikator ini adalah dengan mengikuti Kegiatan/event promosi yang dilaksanakan baik di dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti kegiatan Pojok IKM sebagai sarana promosi pengrajin dalam mengenalkan produknya serta menjaga pelayanan di Dekranasda dan Pusat Promosi Tambang Ulang.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat berperan besar dalam pencapaian target indikator. Adapun rincian kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Dapat kami informasikan bahwa di bawah Bidang Perindustrian, khususnya berkaitan dengan Promosi Produk IKM, kami memiliki 2 tempat promosi yaitu Dekranasda dan Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang. Pada kedua tempat promosi ini, sistem yang dipakai adalah titip jual, dimana IKM menitipkan produknya untuk dijual dan dipromosikan.

Adapun penjualan produk IKM di kedua tempat tersebut selama Tahun 2024 adalah sbb :

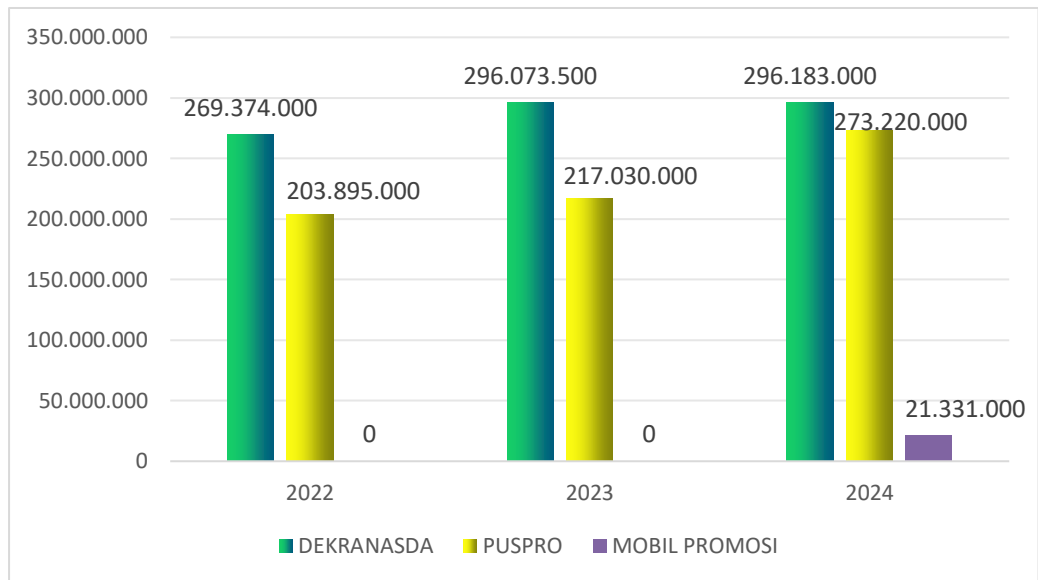
Tabel 3.53
Rekafitulasi Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2024
Pada Dekranasda, Pusat Promosi dan Mobil Toko

NO	BULAN	PENJUALAN DEKRANASDA	PENJUALAN PUSPRO	MOBIL EXPO	JUMLAH
1	JANUARI	15,697,000	16,018,000	2,777,000	34,492,000
2	FEBRUARI	13,150,000	13,715,000	1,869,000	28,734,000

3	MARET	18,767,000	7,308,000	2,619,000	28,694,000
4	APRIL	12,377,000	10,995,000	1,742,000	25,114,000
5	MEI	19,139,000	29,694,000	3,690,000	52,523,000
6	JUNI	21,771,000	18,873,000	1,937,000	42,581,000
7	JULI	26,077,000	36,015,000	116,000	62,208,000
8	AGUSTUS	19,426,000	53,699,000	538,000	73,663,000
9	SEPTEMBER	21,433,000	41,968,000	1,836,000	65,237,000
10	OKTOBER	21,846,000	5,107,000	1,685,000	28,638,000
11	NOVEMBER	25,445,000	32,662,000	2,522,000	60,629,000
12	DESEMBER	81,055,000	7,166,000	-	88,221,000
	JUMLAH	296,183,000	273,220,000	21,331,000	590,734,000
JUMLAH TOTAL		590,734,000			

Pada Tahun 2024, Rata-rata penjualan di Dekranasda Rp. 24.681.917/bulan dan di Pusat Promosi rata-rata penjualan Rp. 22.768.333/bulan dan untuk mobil promosi rata-rata penjualan Rp. 1.777.583/bulan.

Grafik 3.2
Jumlah Penjualan Produk IKM Tahun 2022 sd 2024 Pada Dekranasda Puspro dan Mobil Promosi



Selain dari Dekranasda dan Puspro Tambang Ulang, kami juga melakukan promosi produk melalui berbagai event pameran dan juga menggunakan mobil promosi Dekranasda. Hasil Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2024 dari mobil Promosi adalah sebesar Rp. 21.331.000. Berikut event yang diikuti dengan menggunakan mobil promosi Dekranasda.

Tabel 3.54
Event Yang Diikuti Oleh Mobil Promosi Sepanjang Tahun 2024

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan Desa	Kecamatan	Hasil Penjualan Produk IKM
1	11 Jan 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Kantor Diskopdag Kab. Tanah Laut	Pelaihari	233,000
2	16 Jan 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Kantor Kelurahan Sarang Halang	Pelaihari	670,000
3	18 Jan 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Mesjid Fehin Kel. Pabahanan	Pelaihari	390,000

4	20 Jan 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Pasar Matah Jalan Raya Takisung Kel. Karang Taruna	Pelaihari	609,000
5	22 Jan 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Kantor Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	315,000
6	26 Jan 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Jl. Taruna Jaya Desa Benua Raya	Bati-bati	260,000
7	31 Jan 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Kantor Desa Martadah Baru	Tambang Ulang	300,000
8	02 Feb 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Ds. Simpang 4 Sungai Baru	Jorong	608,000
9	05 Feb 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	+	Batu Ampar	236,000
10	07 Feb 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Villa Arrisa Ds. Ketapang	Bajuin	200,000
11	23 Feb 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Bela Desa Pasar Murah Tahun 2024	Desa Tirta Jaya	Bajuin	205,000
12	27 Feb 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Depan Kantor Desa Kurau	Kurau	620,000
13	01 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Handil Babirik	Bumi Makmur	275,000
14	09 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Handil Maluka	Bumi Makmur	0

15	12 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Kantor Dinsos	Pelaihari	219,000
16	15 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Damar Lima	Batu Ampar	572,000
17	18 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Pandahan	Bati-bati	260,000
18	20 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Kantor Dinsos	Pelaihari	24,000
19	21 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	167,000
20	26 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Ambungan	Pelaihari	278,000
21	28 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Sumber Makmur	Takisung	424,000
22	29 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Bingkulu	Tambang Ulang	355,000
23	30 Mar 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Bumi Harapan	Bumi Makmur	45,000
24	02 Apr 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Pandan Sari	Kintap	481,000
25	03 Apr 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Pulau Sari	Tambang Ulang	45,000

26	18 Apr 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Padang	Bati-bati	143,000
27	19 Apr 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Bela Desa Pasar Murah Tahun 2024	Desa Kuringkit	Panyipatan	528,000
28	22 Apr 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Pertasi Kencana	Pelaihari	545,000
29	05 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Car Free Day Tahun 2024	Halaman Kantor Dinsos	Pelaihari	295,000
30	08 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Batalang	Jorong	535,000
31	12 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Car Free Day Tahun 2024	Halaman Kantor Dinsos	Pelaihari	582,000
32	15 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Kintapura	Kintap	230,000
33	18 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Jorong	Jorong	504,000
34	18 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Benua Tengah	Takisung	64,000
35	28 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Alur	Jorong	468,000
36	29 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Pertasi Kencana	Pelaihari	70,000
37	30 Mei 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi	Desa Durian Bungkok	Batu Ampar	942,000

		Pasar Murah Tahun 2024			
38	09 Juni 2024	Mobil Expo pada Event Car Free Day Tahun 2024	Halaman Kantor Dinsos	Pelaihari	784,000
39	11 Juni 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Kait-kait	Tambang Ulang	493,000
40	13 Juni 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Kintap	Kintap	394,000
41	20 Juni 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Bluru	Tambang Ulang	266,000
42	05 Juli 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Batakan	Panyipatan	116,000
43	23 Agustus 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Bela Desa Pasar Murah Tahun 2024	Desa Sambangan	Bati-bati	50,000
44	29 Agustus 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Tanjung	Bajuin	488,000
45	04 September 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Sungai Jelai	Tambang Ulang	316,000
46	06 September 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Tajau Pecah	Jorong	352,000
47	11 September 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Sukaramah	Batu Ampar	342,000
48	13 September 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Karang Rejo	Jorong	261,000

49	18 September 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Kunyit	Bajuin	-
50	20 September 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Kandangan Baru	Panyipatan	-
51	25 September 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Galam	Bajuin	236,000
52	28 September 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Tambak Karya	Kurau	329,000
53	02 Oktober 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Handil Birayang Bawah	Bumi Makmur	556,000
54	15 Oktober 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Pemuda	Pelaihari	-
55	17 Oktober 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Liang Anggang	Bati-bati	-
56	23 Oktober 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Asri Mulya	Jorong	463,000
57	25 Oktober 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Pantai Linuh	Bajuin	422,000
58	29 Oktober 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Panyipatan	Panyipatan	174,000
59	31 Oktober 2024	Mobil Expo pada Event Bela Desa Tahun 2024	Desa Telaga Langsung	Takisung	70,000
60	05 November 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi	Desa Tebing Siring	Bajuin	635,000

		Pasar Murah Tahun 2024			
61	07 November 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Kait-kait Baru	Bati-bati	607,000
62	12 November 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Pemalongan	Bajuin	66,000
63	15 November 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Halaman Pertasi Kencana	Pelaihari	213,000
64	20 November 2024	Mobil Expo pada Event Partisipasi Pasar Murah Tahun 2024	Desa Bumi Makmur	Bumi Makmur	1,001,000
	JUMLAH				21,331,000

Berikut kegiatan pameran dan mini expo yang diikuti selama Tahun 2024 :

Tabel 3.55
Kegiatan Pameran dan Mini Expo Yang Diikuti Sepanjang Tahun 2024

No.	Kegiatan Mobil Expo dan Pameran	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Peserta
1	Pameran INACRAFT Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC)	Jakarta Convention Center (JCC)	27 s.d 29 Februari 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
2	Pameran Tanah Bumbu Expo Mappanre Ri Tasié 2024	Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu	19 s.d 25 April 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
3	Kegiatan Pengembangan Wawasan ke IKM "Sabar Sasirangan" dan ke Gallery IKM "KA-TO7OE" di Kabupaten Kotabaru	Kota Baru	31 Mei 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
4	Mengikuti Pameran dan Bazar Ekonomi Kreatif Dalam Rangka MTQ Nasional XXXV	Kab. Tapin	01 s.d 02 Mei 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
5	Pameran Bandung Ide Craft dan Gebyar Wisata, Investasi serta Ketahanan Pangan dan Business Matching	D'Botanical Mall Bandung, Jawa Barat	Tgl 27 Juni s.d 01 Juli 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll

6	Expo pada kegiatan Gebyar UMKM, Koprasi dan TJSL EXPO 2024 di Tanah Lot Kabupaten Tabanan Provinsi Bali	Tanah Lot Kabupaten Tabanan Provinsi Bali	09 Agustus 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
7	Mengikuti Kegiatan Pameran IKN Expo 2024	Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur	13 s.d 19 Agustus 2024	Pengrajin, eksportir dan importir, distributor, kolektor, asosiasi pengrajin, BUMN, pemerintah daerah dll
8	Pameran Kriya Nusa Tahun 2024 di JCC Senayan Jakarta	Jakarta Convention Center Jakarta	27 Agustus s.d 2 September 2024	Pengrajin, eksportir dan importir, distributor, kolektor, asosiasi pengrajin, BUMN, pemerintah daerah dll
9	Pameran Pekan Raya Banjarmasin Tahun 2024	Taman Siring Maskot Bekantan	18 s.d 21 September 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
10	Pemran Kalsel Expo 2024	Lapangan Murjani Banjarbaru	18 s.d 20 September 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
11	Pameran Indonesia Tourism & Trade Investmen Expo (ITTIE) 2024	Nagoya Hill, Batam	09 s.d 14 Oktober 2024	Pengrajin, eksportir dan importir, distributor, kolektor, asosiasi pengrajin, BUMN, pemerintah daerah dll
12	Pameran Tanah Bumbu Expo 2024	Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu	04 s.d 06 Desember 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
13	Tala Expo 2024	Halaman Pertasi Kencana	11 s.d 15 Desember 2024	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll
14	Siaran Radio Pojok IKM Tanah Laut	Radio Tuntung Pandang Tala	Dijadwalkan setiap hari selasa pagi	Pemerintah daerah, BUMN, pengrajin, kolektor, asosiasi pengrajin dll

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian indikator Persentase pencari kerja yang kompeten didukung dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.56
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 4

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat merupakan sub kegiatan yang prioritas, karena pada sub kegiatan ini berkenaan dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan keikutsertaan pada kegiatan promosi bagi IKM.

Dengan semakin banyak dana yang diberikan untuk sub kegiatan diatas, maka semakin banyak juga event yang bisa diikuti, serta semakin banyak juga fasilitasi bagi IKM yang bisa ditingkatkan. Dengan demikian akan memberikan efek positif bagi peningkatan taraf ekonomi IKM.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain :

1. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran, sehingga pada tahun 2024 tidak dapat maksimal dalam mengikuti kegiatan promosi produk.
2. Kurangnya jumlah petugas Showroom Dekranasda sehingga pelayanan tidak begitu maksimal terutama kalua ada kunjungan dari daerah lain.

C. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan diatas beberapa hal sebagai solusi untuk mengatasinya yaitu sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan IKM yang ada untuk dapat memasarkan produk-produknya melalui Showroom Dekranasda..
2. Memaksimal petugas yang ada, kalau misalnya ada kunjungan dari daerah lain, maka petugas pelayanan dibantu oleh PNS/PTT dari Bidang Perindustrian.

D. Rencana Aksi 2025

Sebagai tindak lanjut untuk mengurangi permasalahan diatas adalah hal-hal yang perlu dilakukan ditahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama dengan IKM lainnya yang belum ada mempromosikan atau memasarkan produknya di showroom Dekranasda.
2. Melakukan kerjasama dengan SKPD lainnya khususnya terkait promosi produk dan investasi.
3. Mengajukan usul penambahan petugas Dekranasda, karena saat ini hanya ada 1 pegawai yang bertugas melayani pengunjung.
4. Meningkatkan keikutsertaan IKM pada even promosi yang dilaksanakan dalam dan luar daerah

Gambar 3.3
Beberapa Kegiatan Dalam Melakukan Promosi IKM







POJOK IKM



Fambucha

Smks Intan Bara Husada Pelalhari (Keahlian Farmasi)
Jl Rajangah rt 15 rw 1 Sarang Halang Pelalhari

NO HP : 0815572732



SELASA 14 JANUARI 2025 PUKUL 10.00 - 11.00 WITA

ON AIR  <https://tpfm.tanahlautkab.go.id>

LIVESTREAM  INTERAKTIF MELALUI  08115012304

 @akabtanahlaut

 RADIO TUNJUNG PANGSANG FM 102.3 MHz

HOST : MUHAMMAD PERI

 LPM. Kuantan pangsang FM



Indikator Kelima pada Bidang Perindustrian yang mendukung sasaran 2 (dua) adalah indikator **“Persentase Kepatuhan Industri Terhadap SII Nas”**.

Persentase akses pemasaran ini terdiri Jumlah pelaku usaha yang

melaporkan data Industrinya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Adapun cara menghitung persentase IKM yang menerapkan Standarisasi Industri dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Industri yang lapor data Industri di Siinas}}{\text{Jumlah Industri yang terdaftar di Siinas}}$$

$$\frac{87}{229} \times 100\% = 37,99 \%$$

Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi Dengan Target Indikator Pendukung ke 5

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Data Pelaku Industri di SIINas	Persentase Kepatuhan Industri terhadap SIINas	41%	37,99%	92,66%

Tabel 3.58
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung ke 5

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Data Pelaku Industri di SIINas	Persentase Kepatuhan Industri terhadap SIINas	25,7%	40%	37,99%	95%	42%	90,45%

Pada tahun 2024 realisasi persentase kepatuhan industri terhadap SIINas adalah sebesar 92,66%. Hal ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dimana kepatuhan industri hanya berada di 25,7%. hal ini dikarenakan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan/menyampaikan laporannya di SIINas semakin meningkat dibanding tahun 2023.

Tabel 3.59
Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan di SIINas

	Tahun 2023	Tahun 2024
Pelaku usaha yang lapor data industri	33	87
Jumlah industri yang terdaftar di SIINas	128	229

Upaya-upaya dilakukan pada indikator ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi maupun jemput bola dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai pelaporan data industri mereka ke dalam SIINas.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota, verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota serta Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) berperan besar dalam pencapaian target indikator. Adapun rincian kegiatan tahun 2024 sbb :

Tabel 3.60
Pengolahan Data Melalui SIINas

No	Skala Usaha Industri	Pengawasan	Terdaftar	Persentase
1	Industri Kecil	93	193	48%
2	Industri Menengah	1	10	10%
3	Industri Besar	4	26	15%
	Jumlah	98	229	43%

Tabel 3.61
Nama Pemilik IKM

No.	Perusahaan	Alamat Pabrik	Jenis Laporan
1	Citraputra Kebunasri	JL. A. Yani Km. 102, RT.012,RW. 004, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
2	Nor Agni Ilmina	Takisung, Desa/Kelurahan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
3	Fahrianoor Ichsan	Jl. Desa RT.016, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
4	Yayan Noveri	Perum Pesona Karang Taruna 2 Blok F8, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
5	Nining Eko Puji Lestari	JL.UNTUNG SUROPATI RT. 03/01 SEBAMBAN 5 BLOK D, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
6	Sirajuddin	Komplek Gagas Permai Jalan Putar No.100 RT.23 RW.06, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
7	Oemah Olahan Mbak Dyah	Jl. Kolonel Soepirman RT.07/02, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
8	Rina	Jl. Pelabuhan Barat, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
9	Maulidatun Nisa	Pondok Indah Pelaihari III Blok. B No.07, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
10	Winarsih	Martadah Baru, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi

11	Fanesya Sasirangan	Ds. Banyu Irang Gang Rakat RT. 07/03, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
12	Anis Widiawati	Dusun Bumi Asih RT.07 RW.08, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
13	Nurwati	Dusun Bumi Asih RT.04 RW.08, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
14	Nurhasanah	Jl. Kamaratih RT. 19 RW. 001 Desa Panggung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
15	Chalifah	Komp. Multi Madya B/34, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
16	Ardawati	Jl. Sungai Tampang RT. 02 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
17	Paulyn K.i.palandeng	Jl. P. Antasari RT.06 RW.02, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
18	Sri Rahayu	Ds. Martadah Baru RT. 002 RW. 001, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
19	Musmulyani	Jl. Melati RT.006 RW.003, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
20	Srinatun	Jl. A. Yani. RT07. Dusun 03, Desa/Kelurahan Sungai Cuka, Kec. Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
21	Mirayanti	Jl. Raya Alur RT. 03 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi

22	Abdullah Hayat	Jl. Pemukiman 36, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
23	Dwie Wahyuni	Martadah Baru RT.02 RW.01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
24	Fathol Jannah	Jl. A. Yani RT. 05 RW. 02, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
25	MULIANA	Gg. Sabrina Komp. Langgeng Cipta Persada RT.007 RW.002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
26	Didik Winarko	Jl. Rantau Bujur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
27	Siti Khomariyah	Jalan H.M. Sarbini, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
28	Mitra Resolution Group	Dusun 4 Desa Pulausari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
29	Ita Purnamasari	Jl. Muara Asam Asam RT. 01 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
30	Agus Listyaningsih	Desa Martadah Baru RT. 09 RW. 03, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
31	Riky Purnamasari	Jl. Lambenteng Desa Ujung Baru RT.005/002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
32	Norliana	Jl. Pelabuhan RT.003 RW.001, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi

33	Agus Ariadi	Desa Tambak Sarinah, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
34	Helda	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
35	Jamilah	Jl. Anggrek RT.003 RW.002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
36	Hj. Siti Syarah	Jl. PDAM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
37	Supian Hadi	Bingkulu RT. 02 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
38	Rusmina	Desa Bawah Layung RT.005 RW.002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
39	Sayid Hasan	Jl. A. Yani RT. 04 RW. 02, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
40	Suhartati	Desa Maluka Baulin RT. 05 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
41	Siti	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
42	Jouny Stiawan	Jl. Balicak Subur RT. 08 RW. 03, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
43	Muhammad Sabil Mubtadin	Desa Takisung RT. 11 RW. 04, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
44	Nurwulan	Jl. Kebun Kopi RT. 11 RW. 04, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi

45	Seman Farizi	Jl. Pusaka RT.11, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
46	Jubaidah	Jl. Handil Sirang RT. 03 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
47	Hamdanah	Jl. Raya Takisung, Desa Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
48	Bambang Eko Nurdiansyah	Gunung Melati RT.006/002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
49	Yulia Purnama Rukmi	Jl. Merdeka RT. 03 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
50	Ramlah	Jl. A. Yani RT.05, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
51	Aminah	Ds. Sungai Rasau RT.002 RW.001, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
52	Muhammad Marzuki	Jl. Raya RT.06 RW.03, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
53	BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION	Gunung Batu, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
54	Sejahtera Tani Damai	Desa Banyu Irang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan
55	Karimata Timur	Jl. A.YANI KM 34 NO.88 RT 002 RW. 002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi

56	Salmiah	Gunung Raja RT.004 RW.002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
57	Riyanah	Jl. A Yani Gg Antesa Angsau Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
58	Hamdah	Jl. Pembangunan RT. 02 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
59	Cahaya Borneo Sukses Agrosindo	Jl. A. Yani Km 52 RT. 001 RW. 001, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
60	Bintang Banua Abadi	Jalan Sumber Rejeki, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
61	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk.	Jalan A Yani KM. 32, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
62	Marsita Emaliasani	Jl. SOEPIRMAN RT. 04 RW. 02, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
63	Firdaus Hari Laksana	Gunung Melati RT. 11 RW. 02, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
64	Ririn Wulandari	Jl. Harapan RT. 10/002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
65	Misru Minah	Jl. Pembangunan RT. 01 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
66	PANEN EMBUN KEMAKMURAN	Jl. A. Yani Km. 33, Desa Nusa Indah,, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
67	Sumani	Jl. Ibunda RT. 05 RW. 01, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi

68	Dwi Patfinder Rochman	Gunung Melati Rt. 11 Rw. 02, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
69	Saifuddin	Desa Durian Bungkok RT 10 RW 04 Kec, Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
70	Buana Manira Prakarsa	Jl. Liposo Transos, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan
71	Sariguna Primatirta	Desa Pulau Sari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
72	Hokkan Deltapack Industri	Jl. Raya Bentok Kampung RT.05, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
73	Bandangantirta Agung	JL. RAYA BENTOK KAMPUNG RT 005, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
74	Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk	Desa Bukit Mulia, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
75	Majuperkasa Indonesia	Jl. Raya Bentok Kampung RT.001 RW.001, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
76	Tirta Sukses Perkasa	JALAN A. YANI KM 36, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
77	Ebimas Besar	Jl. A. Yani KM. 45,6, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
78	Ciomas Adisatwa	Jl. A. Yani Km 37, RT.01, Ds. Ujung Baru, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi

79	SINAR NUSANTARA INDUSTRIES	Jl. A yani Km 31 RT 03, Desa Liang Anggang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
80	Starone Mitra Telekomunikasi	Jl. Tebing Tinggi, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan
81	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Feedmill Bati-Bati Jl. A. Yani Km. 35,5, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Produksi
82	Cakra Anugerah Konjac	Jl. A. Yani KM. 34, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan
83	Kintap Jaya Wattindo	PMKS KJW Perkebunan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan
84	Kintap Jaya Wattindo	PKR KJW, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan
85	Kintap Jaya Wattindo	Dusun 3 Desa Tebing Siring, RT.011, RW.002, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan
86	Kolaborasi Tiga Saudara	Jalan Cendrawasih, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan
87	Ahmad Yani	Jalan Rajawali Gagah Permai, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Tahap Pembangunan

A. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian indikator Persentase pencari kerja yang kompeten didukung dengan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.62
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	2	
1	PROGRAM PENGENDALIAN IZINUSAHA INDUSTRI	
	-	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
	-	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Pada kegiatan **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** dan kegiatan **Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** merupakan kegiatan yang prioritas, karena pada sub kegiatan ini berkenaan dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendampingan pelaku usaha dalam melaporkan industrinya di SIINas, jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas dan pendampingan terhadap pelaku usaha.

Dengan semakin banyak dana yang diberikan untuk sub kegiatan diatas, maka semakin banyak juga pelaku usaha yang melaporkan data industrinya di SIINas sehingga kita dapat memantau perkembangan industri yang ada di Kab. Tanah Laut.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun antara lain :

1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi legalitas berusaha bagi IKM.
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan data perusahaannya melalui SIINas.

C. Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diterangkan di atas beberapa hal sebagai solusi yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan anggaran yang ada, penyampaian wawasan dan pemahaman terkait legalitas berusaha bagi IKM dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain, melalui monitoring yang dilakukan ke IKM.
2. Selalu memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk melaporkan data perusahaannya melalui SIINas.

D. Rencana Aksi 2025

Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengurangi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi legalitas berusaha di kecamatan-kecamatan.

2. Membuat Surat Edaran dan flyer serta koordinasi dengan kecamatan agar pelaku usaha aktif melaporkan industrinya melalui SIINas

1, Sosialisasi Perizinan di Kecamatan Tambang Ulang



2. Sosialisasi Perizinan di Kecamatan Batu Ampar



1. Pembinaan Perizinan dan Pelaporan Data Industri PT. KJW Tanggal 29 Juli 2024



2. Bimbingan Teknis Pelaporan SIINas PT. Koaborasi Tiga Saudara sebagai hasil tindak lanjut dalam pengawaan inndustri



3. Sasaran 3 (Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind).

Tabel. 3.63
Perbandingan Realisasi Dan Target Indikator Sasaran 3

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	81,55	83,9	102,88

Tabel. 3.64
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thp Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	Capaian		
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	76,16	83,2	81,55	81,55	83,9	102,88	85	98,71%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut SKPD Nomor 700/1.2.1/86/LHE AKIP-Irban IV/Insp/2024 tanggal 01 April 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut :
 - a. Renstra SKPD;
 - b. Renja SKPD;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. Perjanjian Kinerja (PK);
 - f. Cascading/Pohon Kinerja;
 - g. Laporan Kinerja; dan

- h. Dokumen lain yang mendukung.
- 2. Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai SAKIP Disnakerind .
- 3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai sebesar 83,90 dengan kategori **A (Memuaskan)** dimana nilai tersebut menggambarkan akuntabilitas yang ditandai bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dan telah memberi dampak yang nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan ketenagakerjaan.
- 4. Nilai sebagaimana diberikan tersebut merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 25,50% dari bobot sebesar 30% dengan kategori A (memuaskan);
 - b. Pengukuran Kinerja, diperoleh nilai sebesar 24,60% dari bobot sebesar 30% dengan kategori A (Memuaskan);
 - c. Pelaporan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 13,05% dari bobot sebesar 15% dengan kategori BB (Sangat Baik);
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diperoleh nilai sebesar 20,75% dari bobot sebesar 25% dengan kategori A (Memuaskan).

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana diatas, tim reviu SAKIP memberikan saran kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan perbaikan kedepannya yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja.

- Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pimpinan memberikan umpan balik (feedback) terinci dan jelas.
- Setiap dokumen perencanaan kinerja selalu memperhatikan keselarasan indikator kinerja.

b. Pengukuran Kinerja.

- Penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/ terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan).
- Dalam melakukan perubahan renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya.
- Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK) pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja menyajikan umpan balik berkelanjutan.

c. Pelaporan Kinerja.

- Laporan kinerja berkala (monev per triwulan) yang disusun digunakan untuk penyesuaian aktivitas dan anggaran.

- Laporan Kinerja yang disusun digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- Menelaah laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut
- Menyampaikan laporan monitoring evaluasi pertriwulan tahun 2024 Kepada Inspektur Kab. Tanah Laut.

Dari hasil nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yaitu dengan nilai yaitu sebesar **83,90** dengan kategori **A (Memuaskan)** dibandingkan dengan nilai tahun 2023 yaitu dengan nilai sebesar **81,55** kategori **A (Memuaskan)** mengalami peningkatan yaitu sebesar **2,35 poin**, hal ini dikarenakan bahwa dalam laporan 2023 dengan memasukkan perbandingan secara nasional, provinsi maupun kabupaten, dan ini juga berdampak kepada hasil nilai SAKIP disemua SKPD.

Akan tetapi Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2024 yaitu sebesar **83,90** dengan kategori **A (Memuaskan)** jauh lebih baik dibandingkan dengan NILAI SAKIP Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dengan nilai sebesar **70,16** atau selisih **13,74 poin**, dan juga dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar **81,21** dengan kategori **A (Memuaskan)** sedikit lebih baik dengan selisih **0,34 poin**.

Tabel. 3.64
Rekap Nilai Sakip Kab/Kota se Kalsel

Kab/Kota	Nilai 2023	Predikat 2023	Nilai 2024	Predikat 2024
HSS	82.08	A	84.07	A
Balangan	70.17	BB	72.09	BB
Tapin	69.02	B	71	BB
Banjarmasin	72.73	BB	70.7	BB
HST	68.33	B	70.2	BB
Tanah Laut	67.52	B	70.16	BB
Barito Kuala	68.53	B	68.01	B
Tabalong	67.48	B	67.1	B
Tanah Bumbu	66.04	B	67.07	B
Banjar	68.1	B	67.06	B
Banjarbaru	67.02	B	66.83	B
HSU	64.4	B	64.82	B
Kotabaru	61.26	B	61.78	B

Indikator Nilai SAKIP Disnakerind ini juga didukung dengan beberapa indikator pendukung yang ada pada sekretariat dan Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK, yang indikator serta capaiannya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.65
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Pendukung Pada Sekretariat

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24	25,50	106,25%
		Nilai Komponen Pengukuran	24	24,60	102,50%
		Nilai Komponen Pelaporan	12	13,05	108,75%
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	20,75	103,75%
		Nilai Survey Pelayanan Kesekretariatan	90	90,58	100,64%

Tabel. 3.66
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendukung Pada Sekretariat

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Thn 2024 Thp Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24,60	24	25,50	106,25%	27	94,44%
		Nilai Komponen Pengukuran	24,60	24	24,60	102,50%	26	94,62%
		Nilai Komponen Pelaporan	11,85	12	13,05	108,75%	14	93,21%
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20,50	20	20,75	103,75%	21	98,81%
		Nilai Survey Pelayanan Kesekretariatan	90,66	90			95	0,00%

Dari tabel indikator pendukung pada sekretariat itu merupakan komponen-komponen yang menjadi penilaian SAKIP dan ditambah dengan indikator Nilai Suevey Pelayanan Kesekretariatan (Nilai SKM). Jika dibandingkan antara realisasi dengan target yang ada, semua terealisasi melebihi dari yang ditargetkan atau dengan kata lain capaiannya lebih dari 100%. Namun jika dibandingkan dengan penilaian realisasi tahun 2023. Ada nilai yang mengalami kenaikan dan ada jua nilainya tetap/sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua dokumen SAKIP yang disusun sudah sesuai dengan ketentuan dan pelayanan yang diberikan semakin baik.

Tabel. 3.67
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Pendukung Pada Subbag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Memastikan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%
2..	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	Index kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	3	3	3
No	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	100%
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Tabel. 3.68
Perbandingan Capaian Indikator Pendukung Pada Subbag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	100%
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan dari yang dari yang ditargetkan terealisasi seluruhnya, pada indikator Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu, seluruh dokumen-dokumen perencanaan mampu diselesaikan tepat waktu, baik laporan terkait penganggaran dan laporan kinerja. Kemudian pada indikator Index kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah, pelayanan terkait administrasi keuangan mampu terlayani seluruhnya, gaji PNS dan PPPK dapat terbayar tepat waktu, kemudian tunjangan kinerja untuk PNS dan PPPK juga dapat terbayar tepat waktu. Untuk pelayanan-pelayanan lainnya yang

berhubungan dengan keuangan, pembayaran Surat Pertanggungjawaban Keuangan yang diajukan oleh baik oleh sekretariat, bidang dan UPT BLK dapat terbayar seluruhnya. Sedangkan dokumen-dokumen surat pertanggungjawaban tersipkan dengan baik. Untuk laporan-laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan CLAK. Realisasi sebagaimana yang dijelaskan dapat dilihat pada diatas.

Kemudian indikator pendukung yang diampu oleh Subbag Umum dan Kepegawian serta Subbag TU BLK dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel. 3.68
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Pendukung Pada Subbag Umpeg dan Subbag TU BLK

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Menciptakan pelayanan administrasi kepegawaian dengan optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3	3	100%
2	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang baik dan optimal	Index kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	3	3	100%
3	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah sesuai penganggaran yang efisien dengan	3	3	100%
4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	3	100%
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	3	100%
No	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	6 Paket	100%
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	100%
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)	7 Paket	7 Paket	100%

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (BLK)	5 Paket	5 Paket	100%
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dinas)	3 Paket	3 Paket	100%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (BLK)	28 Paket	27 Paket	96,42%
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dinas)	13 Paket	13 Paket	100%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (BLK)	1 Paket	1 Paket	100%
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dinas)	2 Paket	2 Paket	100%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (BLK)	4 Paket	1 Paket	100%
7	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas)	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (BLK)	20 Laporan	0	0
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas)	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BLK)	18 Laporan	17 Laporan	94%
10	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
11	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dinas)	22 Unit	22 Unit	100%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (BLK)	10 Unit	10 Unit	100%
12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (BLK)	3 Unit	3 Unit	100%
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan (Dinas)	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan (BLK)	12 Laporan	12 Laporan	100%
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dinas)	13 Unit	13 Unit	100%

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (BLK)	3 Unit	3 Unit	100%
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	0
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dinas)	39 Unit	38 Unit	97,43%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (BLK)	10 Unit	10 Unit	100%
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
19	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa semu indikator yang telah ditarget dapat terealisasi, walaupun ada beberapa yang tidak tercapai 100%, atau juga ada kegiatan yang realisasinya 0, yaitu pada meliharaan mobil jabatan, karena tahun 2024 tidak ada mobil jabatan maka untuk pemeliharannya tidak ada, Dana dari sub kegiatan ini digeser ke sub kegiatan lain pada saat perubahan 2024.

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan indikator pendukung pada sasaran 3 didukung dengan 1 (satu) program 7 (tujuh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan pada dinas. Sedang pada UPT BLK didukung dengan 1 (satu) program 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.69
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung Pada Subbag Umpeg
dan Subbag TU BLK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11	Penyediaan Bahan/Material
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	BLK	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7	Pengadaan Mebel
	8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program, kegiatan dan sub kegiatan diatas adalah yang sangat mendukung untuk kegiatan rutin dan kelancaran tugas-tugas bidang.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2024 adalah :

1. Masih kurangnya SDM yang dimiliki terutama pada subbag perencanaan dan keuangan, pada subbag umum dan kepegawaian serta pada subbag tata usaha BLK.
2. Masih kurangnya sarana dalam mendukung tugas – tugas dan kegiatan yang dilaksanakan, baik sarana peralatan kerja maupun mobil sebagai sarana untuk pelaksanaan kegiatan lapangan.

C. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, solusi yang dapat kami lakukan adalah :

1. Memanfaatkan SDM yang ada dibantu dengan beberapa PTT, walaupun ini masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas – tugas yang diberikan.
2. Secara bergantian menggunakan armada yang dimiliki untuk pelaksanaan kegiatan ke lapangan.

D. Rencana Aksi 2025

Untuk mengurangi beberapa permasalahan diatas, maka di tahun 2025 akan dilakukan :

1. Menambah sarana peralatan kerja dan sudah dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2025.
2. Memasukkan anggaran untuk penambahan mobil dan roda dua sebagai sarana operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 :

Jumlah belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk tahun anggaran 2024 setelah perubahan ditetapkan sebesar **Rp. 20.944.120.103,99,-** (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tiga koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-

program, kegiatan dan sub kegiatan, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri 20 (dua puluh) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi sebesar atas **Rp. 18.872.168.610,-** (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) atau tercapai **90,11 %**.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dijelaskan dibawah ini :

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Sasaran 1 (Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja)

Untuk mendukung sasaran diatas didukung dengan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi :
 - a.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas dan BLK).
 - a.2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
 - a.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja :

b.1. Sub Kegiatan Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta.

c. Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil

c.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan konsultasi Produktivitas Kepada
Perusahaan Kecil.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja :

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :

a.1. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.

a.2. Sub kegiatan Fasilitasi Rencana Tenaga Kerja Makro

2. Program Penempatan Tenaga Kerja :

a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota :

a.1. Sub kegiatan Pelayanan Antar Kerja.

a.2. Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :

b.1. Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.

c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja :

c.1. Sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.

d. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah
Kabupaten/Kota :

d.1. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja
Migran.

d.2. Sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran
Indonesia Purna Penempatan.

Realisasi anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada sasaran ini dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.70

REALISASI ANGGARAN PADA SASARAN 1					
No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	232.309.921	181.533.835	78,14
		I Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	232.309.921	181.533.835	78,14
		1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	207.565.674	158.828.299	76,52
		2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	24.744.247	22.705.536	91,76
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.133.324.769	1.031.370.613	91,00
		II Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.002.690.784	958.141.401	95,56
		3 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	910.340.784	871.441.401	95,73
		4 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0,00
		5 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	92.350.000	86.700.000	93,88
		III Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80.645.540	42.294.536	52,44
		6 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80.645.540	42.294.536	52,44
		IV Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	49.988.445	30.934.676	61,88
		7 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	49.988.445	30.934.676	61,88
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.112.538.346,99	765.364.240	68,79
		V Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	785.400.849,99	651.846.976	83,00
		8 Pelayanan antar Kerja	230.545.011,99	188.863.856	81,92
		9 Perluasan Kesempatan Kerja	554.855.838	462.983.120	83,44
		VI Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	3.720.000	74,40
		10 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5.000.000	3.720.000	74,40
		VII Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	199.987.196	4.760.000	2,38
		11 Job Fair/Bursa Kerja	199.987.196	4.760.000	2,38
		VIII Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	122.150.301	105.037.264	85,99
		12 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	22.190.000	10.450.000	47,09
		13 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	99.960.301	94.587.264	94,62
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5.270.554.488	5.017.707.350	95,20
		IX Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	5.217.007.167	4.967.572.350	95,22
		14 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	43.554.076	38.935.500	89,40
		15 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	5.173.453.091	4.928.636.850	95,27
		X Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	53.547.321	50.135.000	93,63
		16 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	53.547.321	50.135.000	93,63
JUMLAH			7.748.727.525	6.995.976.038	90,29

Sedangkan capaian kinerja pada indikator kinerja utama pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.71
Realisasi Capaian Kinerja Pada Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69%	73,03%	105,84%

Dari 2 tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan capaian kinerja sebesar 105,84% realisasi keuangan mampu terserap sebesar 90,29% ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 15,55% yang secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.72
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	90,29%	105,84%	15,55%

Sasaran 2 (Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah)

Untuk mendukung sasaran diatas didukung dengan dengan ada 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri :
 - a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota :
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
- 4) Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota :

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kot.
 - 2) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional :

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota :
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Tabel 3.73

REALISASI ANGGARAN PADA SASARAN 2						
No	Sasarn Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Persentase
I	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI USAHA IKM DALAM MENYOKONG PERTUMBUHAN EKONOMI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2.216.684.761,77	1.983.032.120	89,46
		I	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.216.684.761,77	1.983.032.120	89,46
			1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	337.162.553	269.004.400	79,78
			2 Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	504.999.655	462.115.180	91,51
			3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	730.155.978,77	622.506.000	85,26
			4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	617.366.659	602.695.540	97,62
			5 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	26.999.916	26.711.000	98,93
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		69.844.709	63.746.668	91,27
		II	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	69.844.709	63.746.668	91,27
			5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.846.200	18.270.000	92,06
			6 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	49.998.509	45.476.668	90,96
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		113.209.245	112.476.550	99,35
		III	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	113.209.245	112.476.550	99,35
			7 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	113.209.245	112.476.550	99,35
JUMLAH				2.399.738.715,77	2.159.255.338	89,98

Sedangkan capaian kinerja pada indikator kinerja utama pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.74
Realisasi Capaian Kinerja Pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	3,6%	4,5%	124%

Dari 2 tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan capaian kinerja sebesar 124% sedangkan realisasi keuangan mampu terserap sebesar 89,98% ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana yang secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.75
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	89,98 %	124%	34,02%

Sasaran 3 (Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind)

Dalam melaksanakan kegiatan pada sasaran ini didukung dengan 1 program, 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat dibawah ini :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian :
 - c.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- c.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- c.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- c.6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- c.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c.8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - d.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - e.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - e.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - e.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

e.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya.

Tabel 3.76

REALISASI ANGGARAN PADA SASARAN 3					
No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	MENINGKATNYA KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA DISNAKERIND	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.289.398.160	8.465.189.287	91,13
		I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.084.741	9.996.520	90,18
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.664.424	3.802.120	81,51
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.420.317	6.194.400	96,48
		II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.048.190.630	6.298.165.378	89,36
		3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.041.356.849	6.292.020.918	89,36
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.833.781	6.144.460	89,91
		III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.978.000	34.300.000	81,71
		5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.978.000	19.800.000	90,09
		6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	14.500.000	72,50
		IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah	997.342.042	968.796.480	97,14
		7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.993.061	8.984.500	89,91
		8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.747.836	118.389.100	89,86
		9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.854.105	16.964.170	89,98
		10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.040	25.421.002	84,74
		11 Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	40.000.000	100,00
		12 Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	23.325.000	93,30
		13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	706.773.000	704.712.708	99,71
		14 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.975.000	31.000.000	88,63
		V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.833.087	44.818.000	89,94
		15 Pengadaan Mebel	49.833.087	44.818.000	89,94
		VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.151.640	917.368.234	97,58
		16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.000.000	109.141.975	98,33
		17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.151.640	808.226.259	97,48
		VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.818.020	191.744.675	95,48
		18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,00
		19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.883.000	115.982.675	99,23
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	17.580.000	92,53
		21 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.935.020	40.057.000	89,14
		22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	18.125.000	90,63
		JUMLAH	9.289.398.160	8.465.189.287	91,13

Sedangkan capaian kinerja pada indikator kinerja utama pada sasaran 3 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.77
Realisasi Capaian Kinerja Pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	81,55	83,90	102,88

Dari 2 tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan capaian kinerja sebesar 102,88% sedangkan realisasi keuangan mampu terserap sebesar 91,13% ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 11,55% yang secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.78
Efisiensi Anggaran Pada Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	91,13%	102,88%	11,55

2. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Ringkasan Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.79
Ringkasan Belanja Tahun 2021 s/d Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Operasi	13.618.390.892	9.597.072.931,98	70,47	10.176.209.186	8.111.554.198	79,71	12.832.672.684	11.196.454.386	87,15	19.782.487.596,99	17.888.813.110,00	90,43
2.	Belanja Modal	1.776.352.853	1.730.358.823	97,41	114.321.356	103.117.441	90,2	189.367.993	171.584.105	90,61	1.161.632.506,77	983.355.500,00	84,65
	Jumlah	15.394.743.745	9.597.433.484,98	83,94	10.290.530.542	8.214.671.639	84,96	13.022.040.677	11.368.038.491	87,3	20.944.120.103,76	18.872.168.610,00	90,11

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah seluruh belanja pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.394.743.745,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 9.597.433.484,98,- (Sembilan

Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 63,34%, tahun 2022 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10.290.530.542,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) mampu terealisasi sebesar Rp. 8.214.671.639,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) tahun 2023 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 13.022.040.677,- (Tiga Belas Milyar Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) mampu terealisasi sebesar Rp. 11.368.038.491,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 87,30%, sedangkan tahun 2024 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 20.944.120.103,76 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Serratus Dua Puluh Ribu Serratus Tiga Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) mampu terealisasi sebesar Rp. 18.872.168.610,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Serratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 90,11% jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan Kinerja ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran, dalam tahun 2024 telah mencapai target lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69%	73,03%	105,84
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Mennyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	3,6%	4,5%	124%
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	81,55	83,9	102,88%

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

1. Bidang Ketenagakerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan

peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenagakerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut selain itu juga terus melakukan upaya agar tenaga kerja yang sudah ada bisa terserap, dengan melakukan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan job fair/bursa kerja sehingga bisa memberikan kesempatan kepada pencari kerja untuk melihat lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia ada perusahaan tersebut dan mempersiapkan kompetensi dirinya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan,

2. Bidang Perindustrian

- a. Sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah dengan menambah sarana dan prasarana di rumah Rumah Kemasan.
- b. Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaannya.

3. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :

- a. Penguatan kelembagaan dan personil
- b. Membangun jaringan kerja
- c. Pemanfaatan teknologi informasi.

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Kabupaten : Tanah Laut
 Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 b. pelaksanaan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian.
 d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang tenaga kerja dan perindustrian;
 e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 f. pelaksanaan administrasi dinas;
 g. pembinaan UPTD dinas; dan
 h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 thn keatas}} \times 100\%$	Bidang P2TK/UPT BLK/BPS
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Mennyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	$\frac{\text{Nilai produksi IKM tahun n} - \text{Nilai produksi IKM tahun n-1}}{\text{Nilai produksi IKM tahun n} - 1} \times 100\%$	Bidang Perindustrian
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	Hasil Penilaian tim SAKIP Kabupaten	Sekretariat



Telah hari, 2 Januari 2024
 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,

MASTURI, S.STP
 NIP. 19770705 199612 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 01 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/86/LHE AKIP– Irban IV/Insp/ 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut
di-
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

- g. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/116/Insp/ 2024 tanggal 15 Maret 2024.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implelementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD;
- b. Renja SKPD;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK);
- f. Cascading;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 83,90 dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, yaitu Akuntabilitas yang ditandai bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dan telah memberi dampak yang nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan ketenagakerjaan.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,60	25,50
b. Pengukuran Kinerja	30	24,60	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15	11,85	13,05
d. Evaluasi Internal	25	20,50	20,75
Nilai Hasil Evaluasi		81,55	83,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi komponen perencanaan kinerja, telah menerapkan manajemen sebagai berikut:

- Penyusunan perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan;
- Pimpinan unit kerja sepenuhnya terlibat dalam pencapaian kinerja;
- Indikator kinerja pada tiap-tiap dokumen menunjukkan keselarasan

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan telah sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran;
- Telah melakukan perubahan Renja, dan perubahan tersebut berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan);
- Dalam penilaian SKP bulanan pimpinan memberikan umpan balik (*feedback*) yang berkelanjutan;

3. Pelaporan Kinerja

Dari komponen pelaporan kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Laporan kinerja berkala telah disusun, dan telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja;

- b. Laporan kinerja telah disusun, dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

4. Evaluasi Internal

- a. Sebagian besar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya,

5. Rekomendasi / Saran

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, dalam rangka lebih meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja yang akan datang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dalam Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan;
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pimpinan memberikan umpan balik (*feedback*) terinci dan jelas;
- c. Setiap dokumen perencanaan kinerja selalu memperhatikan keselarasan indikator kinerja ;

2. Pengukuran Kinerja

- a. Penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan);
- b. Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya;
- c. Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK) pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja menyajikan umpan balik yang berkelanjutan;

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun digunakan untuk penyesuaian aktivitas dan anggaran;
- b. Laporan kinerja yang disusun digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4. Evaluasi Internal

- a. Menelaah laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut;
- b. Menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024 kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut.

6. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi sakip tahun sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. dan telah melakukan upaya meningkatkan perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun renstra SKPD tahun 2024–2026, sebagai dokumen perencanaan transisi menuju 2026;
2. Membuat pohon kinerja sebagai dasar untuk menyusun perencanaan;

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Inspektur,
Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Pj. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

**LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
UNIT KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERIODE EVALUASI 2023**

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		25,50	85,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40	90,00%
1)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
4)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
5)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	A	8,10	90,00%
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i> - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (<i>achievable</i>) dan realistis				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00	80,00%
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
8)	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja Individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60	82,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40	90,00%
1)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator				
2)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20	80,00%
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00	80,00%
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
7)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
8)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		13,05	87,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70	90,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	BB	3,60	80,00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	A	6,75	90,00%
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,75	83,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00	80,00%
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit				
2)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah				
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	A	6,75	90,00%
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	BB	10,00	80,00%
1)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
2)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00		83,90	83,90%
PREDIKAT			MEMUASKAN		

Kesimpulan Hasil Evaluasi :

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Wakil Penanggungjawab



Hj. Riva Mahrani, ST
NIP. 197702232006042009

Evaluatur



Suprihandoko
NIP. 196406061986031035



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**
KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIR RAHMAN**
Jabatan : **PENJABAT BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. **BUPATI TANAH LAUT,**


SYAMSIR RAHMAN

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	10%
3.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	81,55

PROGRAM DAN KEGIATAN


No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.084.741
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.048.190.630
		3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.978.000
		4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	997.342.042
		5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.833.087
		6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.151.640
		7) Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.818.020

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	407.765.505
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.002.690.784
		2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80.645.540
		3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	49.988.445
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	785.400.849,99
		2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
		3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	199.987.196
		4) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	122.150.301
5	Program Hubungan Industrial	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.217.007.167
		2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	53.547.321
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.216.684.761,77
7	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten /kota	1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	69.844.709

8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	113.209.245
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota (UPT BLK)	1) Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.759.903
		2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.441.410
		3) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	72.850.000
		4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.660.000
10	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT BLK)	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.152.544.390
10 Program		25 Kegiatan	20.944.120.103,76

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

KEPALA DINAS,



MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **WIYANTI MELANSARI, SH**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASTURI, S.STP**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 09 Oktober 2024



KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

Plt. SEKRETARIS,

WIYANTI MELANSARI, SH

NIP. 19760624 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24
		Nilai Komponen Pengukuran	24
		Nilai Komponen Pelaporan	12
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
		Nilai Survey Pelayanan Kesekretariatan	90

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.084.741
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.048.190.630
		3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.978.000
		4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.181.101.945
		5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.274.497
		6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.001.640
		7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.478.020

Pelaihari, 09 Oktober 2024



KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

Plt. SEKRETARIS,

WIYANTI MELANSARI, SH

NIP. 19760624 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **AHKMAD NOPRIADI, A.P, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004


AHKMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Kompeten	9%
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja Yang Teraftar	24%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	232.309.921
		- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	207.565.674
		- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	24.744.247,
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan Berdaarkan Unit Kompetensi	2.285.869.159
		- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kalster Kompetensi	1.898.300.024
		- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	10.400.000
		- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	246.535.150
		2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80.645.540



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814


		- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80.645.540
		3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	49.988.445
		- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	49.988.445
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	785.400.849,99
		- Pelayanan Antar Kerja	230.545.011,99
		- Perluasan Kesempatan Kerja	554.855.838
		2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
		- Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5.000.000
		3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	199.987.196
		- Job Fair/Bursa Kerja	199.987.196
		4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	122.150.301,
		- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	22.190.000
		- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	99.960.301

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004


AHKMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **WIYANTI MELANSARI, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 20 September 2024

KEPALA BIDANG HIJSTK,

WIYANTI MELANSARI, SH.
NIP. 19760624 200501 2 017



MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	25%
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindungi Jaminan Ketenagakerjaan	40%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.217.007.167
		- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	43.554.076
		- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	5.173.453,091
		2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	53.547.321
		- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	53.547.321


KEPALA DINAS
DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TANAH LAUT
MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

Pelaihari, 20 September 2024

KEPALA BIDANG HIJSTK,


WIYANTI MELANSARI, SH.
NIP. 19760624 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **NURMAYA SAVITRI, ST, MS**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 20 September 2024

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,


NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007


KEPALA DINAS,
MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
 Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan IKM Yang Menerapkan Standarisasi Industri	Persentase IKM yang menerapkan standarisasi industri	3%
2	Meningkatkan Pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Sentra IKM	33%
		Persentase Pengembangan Kawasan Industri	0,6%
3	Meningkatkan Akses Pemasaran IKM	Persentase Akses Pemasaran IKM	16,83%
4	Meningkatnya Data pelaku Industri di SIINas	Persentase Kepatuhan Industri Terhadap SIINas	40%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.216.684.761,77
		- Koordinasi dan sinkronasi dan pelaksanaan kebijakan perwilayahan industri	337.162.553
		- Koordinasi, Sinkronasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	504.999.655
		- Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	730.155.978,77
		- Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	617.366.659
		- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	26.999.916
2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	113.209.245



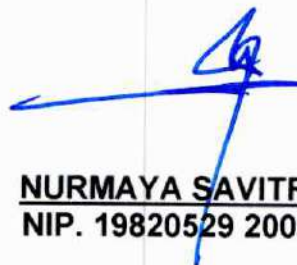
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

		- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	113.209.245
3.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	69.844.709
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	19.846.200
		- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49.998.509

Pelaihari, 20 September 2024


KEPALA DINAS,
MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,


NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WIYANTI MELANSARI, SH
Jabatan : Plt. Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 09 Oktober 2024

**KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,**

Plt. SEKRETARIS,

WIYANTI MELANSARI, SH
NIP. 19760624 200501 2 017

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Memastikan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%
2..	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	Index kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	3

No	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.084.741
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.664.424
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.420.317
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.048.190.630
		- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.041.356.849
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.833.781

Pelaihari, 09 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS,

WIYANTI MELANSARI, SH
NIP. 19760624 200501 2 017

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **SULASTRI LATIF, S.STP**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIYANTI MELANSARI SH**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 09 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS,


WIYANTI MELANSARI, SH
NIP. 19760624 200501 2 017

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


SULASTRI LATIF, S.STP
NIP. 19940405 201609 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menciptakan pelayanan administrasi kepegawaian dengan optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Nilai	3
2	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang baik dan optimal	Index kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Nilai	3
3	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah sesuai penganggaran yang efisien dengan	Nilai	3
4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai	3
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai	3

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket
7	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
8	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
10	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
11	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit
12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
19	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.978.000
		- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.978.000
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	997.342.042
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	14.956.549
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.236.459

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.799.308
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.957.629
		- Penyediaan Bahan/Material	40.000.000
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	27.000.000
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	841.177.000
		- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.975.000
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.833.087
		- Pengadaan Mebel	84.396.146
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.151.640
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.850.000
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.151.640
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.818.020
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	146.883.000

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		- Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	19.000.000
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.878.351
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.935.020
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.660.000

Pelaihari, 09 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS,

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,



WIYANTI MELANSARI, SH
NIP. 1970624 200501 2 017



SULASTRI LATIE, S.STP
NIP. 19940405 201609 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ANITA, A.Md
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2024

**KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,**

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

PENGELOLA KEUANGAN,

ANITA, A.Md
NIP. 19850315 200501 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyusun dokumen dan bukti-bukti kegiatan secara tertib dan teratur.	Jumlah dokumen yang diarsipkan	1000 Dokumen
2.	Menyimpan dokumen usulan pembayaran SPP, SPM dan dokumen peraturan keuangan lainnya.	Jumlah dokumen yang diarsipkan	40 Dokumen
3.	Menerima dan mencatat nomor, tanggal dan pokok surat yang diterima oleh subbag keuangan ke dalam buku agenda dalam rangka tertib administrasi	Jumlah surat yang diagendakan	30 Surat
4.	Mencatat dan mengarsip naskah dinas yang diselesaikan dan diproses lingkup subbag keuangan secara tertib dan teratur	Jumlah dokumen	15 Dokumen
5.	Menginventarisasi pengeluaran keuangan / membuat kartu kontrol sesuai prosedur yang ditentukan dalam rangka tertib administrasi keuangan	Jumlah dokumen	552 Dokumen
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100 Kegiatan

Pelaihari, 02 Januari 2024

**KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,**


YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

PENGELOLA KEUANGAN,


ANITA, A.Md
NIP. 19850315 200501 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : DENNI SUPRIYADI, A.Md
Jabatan : PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AKHMAD NOPRIADI, A.P, M. Si
Jabatan : PIt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Nopember 2024

PIt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,

AKHMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001

PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,

DENNI SUPRIYADI, A.Md
NIP. 19871110 201101 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengelola bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah bahan yang dikelola	12 Kali
2.	Mengumpulkan dan mengelola bahan laporan statistik bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan yang dikumpulkan	12 Kali
3.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan	Jumlah terlaksananya tugas lain	12 kali

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

AHKMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001

**PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,**

DENNI SUPRIYADI, A.Md
NIP. 19871110 201101 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SITI HAFSAH, A.Md

Jabatan : BENDAHARA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YULIANI ASTUTI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2024

KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

BENDAHARA,

SITI HAFSAH, A.Md
NIP. 19930330 201502 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah bahan pertanggung jawaban bendahara	2 bahan
2	Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai prosedur yang berlaku	Jumlah surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan	60 Berkas
3	Mengurus surat perintah membayar uang berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diurus sesuai prosedur yang berlaku	60 Berkas
4	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah tagihan yang telah dibayar sesuai ketentuan	1400 kwitansi
5	Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang telah dibukukan	57 dokumen
6	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan Keuangan yang dibuat sesuai ketentuan	20 Laporan
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	20 Laporan

Pelaihari, 02 Januari 2024

**KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,**



YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010

BENDAHARA,



SITI HAFSAH, A.Md
NIP. 19930330 201502 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : HERMAN

Jabatan : PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NURMAYA SAVITRI, ST, MS

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

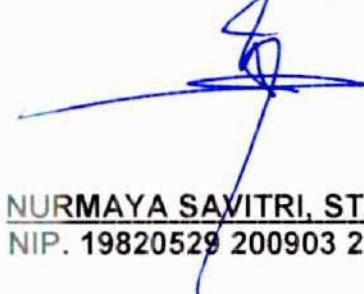
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2024

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,



NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007

PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN
DAN PUBLIKASI,



HERMAN
NIP. 19831118 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

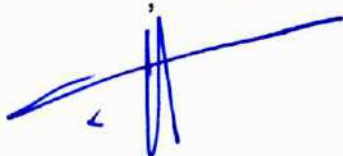
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu berkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan Partisipasi dalam Event-event Pameran dan Mobile Expo	Jumlah laporan pelaksanaan partisipasi kegiatan pameran dan mobile expo	24 Kegiatan
2.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan program, rencana kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan
3.	Membantu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah laporan	2 Dokumen
4.	Membantu Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan Pengolahan data Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	12 Kegiatan

Pelaihari, 02 Januari 2024

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,


NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007

**PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN
DAN PUBLIKASI,**


HERMAN
NIP. 19831118 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ERNA FITRIANI, S.Sos

Jabatan : INSTRUKTUR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AKHMAD NOPRIADI, A.P. M.Si

Jabatan : **Pit. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Pit. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

INSTRUKTUR AHLI MUDA,

AKHMAD NOPRIADI, A.P. M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001


ERNA FITRIANI, S.Sos
NIP. 19701203 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN


Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Melakukan indentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi	Jumlah Kebutuhan Pelatihan Atau Pengukuran Produktivitas Yang Diidentifikasi	1 Dokumen
2.	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah Program Pelatihan Yang Disusun	1 Program Pelatihan
3.	Menyusun program peningkatan produktivitas bagi masyarakat / lembaga swadaya masyarakat	Jumlah Program Peningkatan Produktivitas Yang Disusun	1 Program Peningkatan Produktivitas
4.	Melakukan pendampingan dan konsultasi pada perusahaan menengah	Jumlah Pendampingan Perusahaan Menengah	1 Dokumen

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**


AKHMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001

INSTRUKTUR AHLI MUDA,


ERNA FITRIANI, S.Sos
NIP. 19701203 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RUSMILA, S.S, M.Pd

Jabatan : ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AKHMAD NOPRIADI, A.P,M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Nopember 2024

Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,

ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,


AKHMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001


RUSMILA, S.S, M.Pd
NIP. 19750729 200501 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah hasil laporan pengumpulan bahan-bahan kerja	50 Laporan
2.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah hasil Analisa dan telaah sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	40 Dokumen
3.	Membuat Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Adanya laporan berdasarkan hasil kerja kepada pimpinan	40 Laporan
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan berdasarkan terlaksananya tugas lain	50 kegiatan

Pelaihari, 02 Nopember 2024

Plt. **KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

AHKMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001

**ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,**


RUSMILA, S.S, M.Pd
NIP. 19750729 200501 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **AKHMAD NASHAR, S.H.**

Jabatan : **MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASTURI, S.STP**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS,


MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

**MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI
PERTAMA,**


AKHMAD NASHAR, SH
NIP. 19901025 202012 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu menganalisis Unjuk Rasa, Mogok Kerja/Penutupan Perusahaan	Data Mogok Kerja / Penutupan Perusahaan	1 Data
2.	Membantu mengidentifikasi dan mendata PHK	Data Pemutusan Hubungan Kerja	10 Data
7	Membantu melayani konseling / sosialisasi HI untuk masyarakat	Laporan Konseling / Sosialisasi Hubungan Industrial	12 Laporan
8	Membantu melaksanakan Mediasi dan Perjanjian Bersama	Dokumen Mediasi dan Perjanjian Bersama	4 Dokumen
9	Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan atas perintah atasan	Laporan Tugas	12 Laporan

Pelaihari, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS,


MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

**MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI
PERTAMA,**


AKHMAD NASHAR, SH
NIP. 19901025 202012 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gaqas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **NASRULLAH, SHI**
Jabatan : **ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AKHMAD NOPRIADI, A.P, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

**ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,**


AKHMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001


NASRULLAH, S.H
NIP. 19750905 200701 1 012



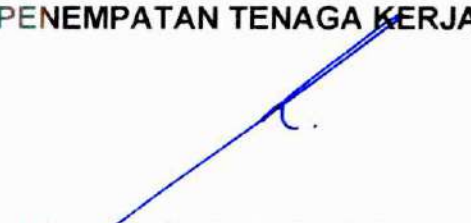
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah kegiatan yang dikumpulkan	12 Kali
2.	Membuat laporan statistik dan bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah kegiatan yang dikumpulkan	12 Kali
3.	Pelaporan informasi pasar kerja (IPK)	Jumlah dokumen yang dikumpulkan	12 Kali
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah dokumen yang dikumpulkan	24 Kali
5.	Menanda tangani kartu (Ak.1) bagi pencari kerja, pada waktu tertentu dapat bertindak sebagai petugas antar kerja	Jumlah dokomen yang dikumpulkan	600 Kali

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Plt. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**


AKHMAD NOPRIADI, A.P. M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001

**ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,**


NASRULLAH, S.H.I
NIP. 19750905 200701 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **YASID ARAFAT, SKM**

Jabatan : **PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NURMAYA SAVITRI, ST, MS**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pelaihari, 02 Januari 2024

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,


NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007

**PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN MUDA,**


YASID ARAFAT, SKM
NIP. 19700506 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah konsep program penyuluhan	3 Dokumen
2.	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan/ sosialisasi/ temu wicara serta melayani jasa konsultasi industri bagi pengusaha atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	5 Laporan
3.	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru/ pengusaha dan atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	7 Kegiatan
4.	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	1 Laporan
5.	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event – event pameran indag	Jumlah laporan hasil fasilitasi keikutsertaan IKM dalam event pameran	2 Laporan
6.	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penyuluhan Industri	3 Laporan
7.	Mendorong Pelaporan Data Industri Berkala Oleh Pelaku Usaha Yang Terdaftar Pada SIINas	Jumlah Laporan	2 Laporan

Pelaihari, 02 Januari 2024

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,


NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007

**PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN MUDA,**


YASID ARAFAT, SKM
NIP. 19700506 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **ANDHIKA PUTRI PARAMITA, ST, MT**
Jabatan : **PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NURMAYA SAVITRI, ST, MS**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pelaihari, 20 September 2024

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,


NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007

**PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN AHLI MUDA,**


ANDHIKA PUTRI PARAMITA, ST, MT
NIP. 19870129 201101 2 001




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri.	Jumlah konsep program penyuluhan	1 Dokumen
2.	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan, sosialisasi/ temu wicara, serta melayani jasa konsultasi dan fasilitasi industri bagi pelaku usaha perorangan dan kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan fasilitasi	2 Laporan
3.	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru, pelaku usaha perorangan dan kelompok usaha indag kecil dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	7 Kegiatan
4.	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	2 Laporan
5.	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event-event pameran indag	Jumlah laporan pelaksanaan partisipasi kegiatan pameran	1 Laporan
6.	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan	1 Laporan
7.	Mendorong Pelaporan Data Industri Berkala Oleh Pelaku Usaha Yang Terdaftar Pada SIINas	Jumlah Laporan	2 Laporan

Pelaihari, 20 September 2024

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,


NURMAYA SAVITRI, ST, MS
NIP. 19820529 200903 2 007

**PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN AHLI MUDA,**


ANDHIKA PUTRI PARAMITA, ST, MT
NIP. 19870129 201101 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **RUSMILA, S.S, M.Pd**

Jabatan : **ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ELIZA MEILANI, M. Psi**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 20 September 2024

**ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,**

KEPALA BIDANG P2TK,

ELIZA MEILANI, M. Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

RUSMILA, S.S, M.Pd
NIP. 19750729 200501 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah hasil laporan pengumpulan bahan-bahan kerja	50 Laporan
2.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah hasil Analisa dan telaah sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	40 Dokumen
3.	Membuat Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Adanya laporan berdasarkan hasil kerja kepada pimpinan	40 Laporan
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan berdasarkan terlaksananya tugas lain	50 kegiatan

Pelaihari, 20 September 2024

**ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA,**

KEPALA BIDANG P2TK,

ELIZA MEILANI, M. Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

RUSMILA, S.S., M.Pd
NIP. 19750729 200501 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **FADLY FAUZAN, S.H.**
Jabatan : **MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASTURI, S.STP**
Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pelaihari, 20 September 2024

**MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
AHLI MUDA.**

KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004


FADLY FAUZAN, S.H.
NIP. 19870708 201402 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu Pencatatan Lembaga Ketenagakerjaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Dokumen Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	1 Dokumen
2.	Membantu Pencatatan Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Kerjasama Bipartit	Dokumen Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	8 Dokumen
3.	Membantu Membuat Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Kerjasama Tripartit	Surat Keputusan Bupati	1 SK
4.	Membantu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perkara	3 Perkara
5.	Membantu Membuat Data PHK	Jumlah Laporan Pemutusan Hubungan Kerja	12 Laporan
6.	Membantu Membuat Data Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Lembaga Ketenagakerjaan	12 Laporan
7.	Membantu Membuat Data Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Laporan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 Laporan
8.	Membantu melakukan Layanan Konseling Teknis Bidang Hubungan Industrial	Jumlah Konseling	12 Kali

Pelaihari, 20 September 2024

KEPALA DINAS,


MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
AHLI MUDA,


FADLY FAUZAN, S.H.
NIP. 19870708 201402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **SHALEH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AKHMAD NOPRIADI, A.P, M.Si**

Jabatan : **Pit. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Pit. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

PENGADMINISTRASI UMUM,

AKHMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001


SHALEH
NIP. 19771110 200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
A	Kinerja Utama		
1.	Memberi lembar pengantar pada administrasi umu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah pengantar lembar kegiatan pada administrasi umum	25 Kegiatan
2.	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah dokumen pada administrasi umum	20 Dokumen
3.	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan pada pencatatan dan penerimaan administrasi umum	125 Kegiatan
4.	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen pada pengelelompokan administrasi umum	75 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	350 Kegiatan

Pelaihari, 02 Nopember 2024

**Pit. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA,**

PENGADMINISTRASI UMUM,

AHKMAD NOPRIADI, A.P, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001

SHALEH
NIP. 19771110 200701 1 015

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN

Eselon 2/Kepala Dinas

Sasaran/Indikator Kinerja			Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja											
	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69	-	-	-	69	-	-	-	73,03
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah											
	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	%	3,6	-	-	-	3,6	-	-	-	4,5
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind											
	1	Nilai SAKIP Disnakerind	Nilai	81,55	-	-	-	81,55	-	83,90	-	-

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran/Indikator Kinerja			Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja											
	1	Persentase Serapan Tenaga Kerja Yang Terdaftar	%	24	-	-	-	24	-	-	-	27,46
2	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja											
	1	Persentase Pencari Kerja Yang Kompeten	%	9	-	-	-	9	-	-	-	9,2

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sasaran/Indikator Kinerja			Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja											
	1	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	%	25	-	-	-	25	-	-	-	89
	2	Persentase Tenaga Kerja Yang Terlindungi Jaminan Ketenaga Kerjaan	%	40	-	-	-	40	-	-	-	30,05

Kepala Bidang Perindustrian

Sasaran/Indikator Kinerja			Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatkan IKM Yang Menerapkan Standarisasi Industri											
	1	Persentase IKM Yang Menerapkan Standarisasi Industri	%	3	-	-	-	3	-	-	-	11,3
	2	Persentase Pengembangan Sentra IKM	%	33	-	-	-	33	-	-	-	58,3
	3	Persentase Pengembangan Kawasan Industri	%	6	-	-	-	6	-	-	-	6,2
	4	Persentase Akses Pemasaran IKM	%	16,83	-	-	-	16,83	-	-	-	13,09
2	Meningkatnya Pengelolaan Data Industri											
	1	Persentase Kepatuhan Industri Terhadap SIINas	%	40	-	-	-	40	-	-	-	37,99

Sekretaris

Sasaran/Indikator Kinerja			Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan											
	1	Nilai komponen perencanaan	Nilai	25	-	-	-	25	-	-	-	25,50
	2	Nilai komponen pengukuran	Nilai	24	-	-	-	24	-	-	-	24,60
	3	Nilai komponen Pelaporan	Nilai	12	-	-	-	12	-	-	-	13,05
	4	Nilai komponen evaluasi internal	Nilai	20	-	-	-	20	-	-	-	20,75
	5	Nilai survei pelayanan kesekretariatan	Nilai	90	-	-	-	90	-	-	-	90,58

Nama : Rani Yasodhara, SKM
NIP : 1981322 200903 2 004
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda

Nama : Fadly Fauzan, SH
NIP : 19870708 201402 1 001
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda

[illegible]

Nama : Akhmad Nashar, SH
NIP : 19901025 202012 1 009
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama

[illegible]

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Andhika Putri Paramitha, ST, MT
NIP : 19870129 201101 2 001
Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri.	Jumlah konsep program penyuluhan	1 Dokumen	1										1	1
2	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan, sosialisasi/ temu wicara, serta melayani jasa konsultasi dan fasilitasi industri bagi pelaku usaha perorangan dan kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan fasilitasi	2 Laporan												
3	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru, pelaku usaha perorangan dan kelompok usaha indag kecil dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	7 Kegiatan			1		2	1	2		1	2		
4	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	2 Laporan								1				
	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event-event pameran indag	Jumlah laporan pelaksanaan partisipasi kegiatan pameran	1 Laporan								1		1		
	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan	1 Laporan												
5	Mendorong Pelaporan Data Industri Berkala Oleh Pelaku Usaha Yang Terdaftar Pada SIINas	Jumlah Laporan	2 Laporan						1						1

Nama : Yasid Arafat, SKM
NIP : 19700506 199503 1 003
Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Merumuskan konsep program penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah konsep program penyuluhan	3 Dokumen		3										
2	Melaksanakan penyuluhan indag melalui pendataan/ sosialisasi/ temu wicara serta melayani jasa konsultasi industri bagi pengusaha atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	5 Laporan						2		1	2			
3	Melaksanakan kegiatan pelatihan pembangunan sumber daya industri bagi wirausaha baru/ pengusaha dan atau kelompok usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	7 Kegiatan			1		2	1	2		1	2		
4	Melaksanakan bimbingan penerapan manajemen mutu usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil fasilitasi manajemen mutu bagi IKM	1 Laporan												1
	Mengembangkan usaha indag melalui peran aktif partisipasi dalam event - event pameran indag	Jumlah laporan hasil fasilitasi keikutsertaan IKM dalam event pameran	2 Laporan							1					1
	Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag kecil pasar dalam negeri	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penyuluhan Industri	3 Laporan												3
5	Mendorong Pelaporan Data Industri Berkala Oleh Pelaku Usaha Yang Terdaftar Pada SIINas	Jumlah Laporan	2 Laporan							1					1

Nama : Herman
NIP : 19831118 200701 1 001
Jabatan : Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Membantu berkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan Partisipasi dalam Event-event Pameran dan Mobile Expo	Jumlah laporan pelaksanaan partisipasi kegiatan pameran dan mobile expo	24 Kegiatan	14	6	20	19	16	14	9	13	14	15	20	13
2	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan program, rencana kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	1	3	1	1	1	3	3	6	6	1	9	6
3	Membantu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah laporan	2 Dokumen	1	3	5	3	5	4	10	5	7	5	2	4
4	Membantu Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan Pengolahan data Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	12 Kegiatan	9	14	6	9	4	8	4	5	2	8	3	2

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Rusmila, S.S,MPd
NIP : 19750729 200501 2 011
Jabatan : Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah hasil laporan pengumpulan bahan-bahan kerja	50 Laporan	10	8	13	15	11	6	7	10	9	25	12	50
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah hasil Analisa dan telaah sesuai dengan bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	48 Dokumen	3	5	6	4	6	3	3	9	2	8	7	1
3	Membuat Laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Adanya laporan berdasarkan hasil kerja kepada pimpinan	48 Laporan	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan berdasarkan terlaksananya tugas lain	50 Kegiatan	8	2	2	4	14	16	15	9	2	30	33	7

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Erna Fitriani, S.Sos
NIP : 19701203 200604 2 007
Jabatan : Instruktur Ahli Muda

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Melakukan indentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi	Jumlah Kebutuhan Pelatihan Atau Pengukuran Produktivitas Yang Diidentifikasi	1 Dokumen	7	4	3	5		8	6		20	1	7	2
2	Menyusun program pelatihan pada level operator	Jumlah Program Pelatihan Yang Disusun	1 Program Pelatihan							1	1	10	4		7
3	Menyusun program peningkatan produktivitas bagi masyarakat / lembaga swadaya masyarakat	Jumlah Program Peningkatan Produktivitas Yang Disusun	1 Program Peningkatan Produktivitas	15	2	1	1	1					6	7	18
4	Melakukan pendampingan dan konsultasi pada perusahaan menengah	Jumlah Pendampingan Perusahaan Menengah	1 Dokumen		2			2	20	1	1			5	1

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Rizqi Mutahara, SE
NIP : 19880402 202012 1 011
Jabatan : Pengantar Kerja Pertama

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Menyusun statistik informasi pasar kerja	Jumlah laporan statistik	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Menyusun data penempatan tenaga kerja	Jumlah laporan penyusunan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Mengidentifikasi ketersediaan informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja	Jumlah dokumen informasi lowongan kerja	60 Dokumen	31	10	8	14	6	5	8	11		7	4	13
4	Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja	Jumlah laporan pelayanan	60 Laporan	31	10	8	14	6	5	8	11		7	4	13
5	Melakukan layanan pendaftaran pencari kerja	Jumlah dokumen layanan	500 Dokumen	142	56	82	16	54	51	46	66	140	46	42	21
6	Menganalisis kelayakan dokumen pengajuan paspor calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah laporan analisis	3 Laporan												-
7	Melakukan kompilasi data yang akan diserahkan kepada stakeholder/pemangku kepentingan untuk tindak lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA	Jumlah laporan pengumpulan atau pengolahan data	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diselesaikan	120 Kegiatan	6	16	18	2	17	20	5	3	27	13	18	-

117

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Shaleh
NIP : 19771110 200701 1 015
Jabatan : Pengadministrasi Umum

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Memberi lembar pengantar pada administrasi umu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah pengantar lembar kegiatan pada administrasi umum	25 Kegiatan	4	8	4	17	5	8	10	13	10	10	10	10
2	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah dokumen pada administrasi umum	20 Dokumen	1	2	2	1	1	3	15	10	15	5	5	5
3	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah kegiatan pada pencatatan dan penerimaan administrasi umum	125 Kegiatan	2	3	2	4	4	5	15	5	3	5	5	5
4	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen pada pengelelompokan administrasi umum	75 Dokumen	3	6	4	3	3	4	5	5	5	5	10	5
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan	1	5	4	3	4	3	10	5	3	10	10	10
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan yang diperintahkan oleh pimpinan aik tertulis maupun lisan	350 Kegiatan	45	93	31	41	20	13	15	5	5	15	15	15

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Denni Supriyadi, A.Md
NIP : 19871110 201101 1 003
Jabatan : Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mengelola bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah bahan yang dikelola	12 Kali	4					1		4	1	2		
2	Mengumpulkan dan mengelola bahan laporan statistik bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan yang dikumpulkan	12 Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan	Jumlah terlaksananya tugas lain	12 Kali	1	1	2	1	1	1		2		3		

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Nasurullah, S.H.I
NIP : 19750905 200701 1 012
Jabatan : Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah kegiatan yang dikumpulkan	12 Kali	12	9	7	4	8	4	17	5	8	6	6	1
2	Membuat laporan statistik dan bulanan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah kegiatan yang dikumpulkan	12 Kali	1	1	3	1	2	2	1	1	3	1	1	1
3	Pelaporan informasi pasar kerja (IPK)	Jumlah dokumen yang dikumpulkan	12 Kali	6	6	4	2	3	2	4	4	5	3	5	4
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah dokumen yang dikumpulkan	24 Kali	5	6	7	3	6	4	3	3	4	5	3	6
5	Menanda tangani kartu (Ak.1) bagi pencari kerja, pada waktu tertentu dapat bertindak sebagai petugas antar kerja	Jumlah dokumen yang dikumpulkan	600 Kali	49	55	47	41	94	48	70	65	39	65	52	64

Nama : M. Aulia Rahman, A.Md
NIP : 19821002 200501 1 005
Jabatan : Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas

[illegible]

Nama : Yuliani Astuti, SE
NIP : 19741029 200501 2 010
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Nama : Sulastris Latif, S.STP
NIP : 19940405 201609 2 001
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama : Sulastris Latif, S.STP
NIP : 19940405 201609 2 001
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan														
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	-	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	
7	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2
10	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	-	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1

16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	-
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Siti Hafsa*h*, A.Md
NIP : 19930330 201502 2 002
Jabatan : Bendahara

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah bahan pertanggung jawaban bendahara	2 Bahan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai prosedur yang berlaku	Jumlah surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan	60 Berkas	3	5	13	6	8	12	-	-	-	5	11	14
3	Mengurus surat perintah membayar uang berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diurus sesuai prosedur yang berlaku	60 Berkas	3	5	13	6	8	12	-	-	-	5	11	14
4	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah tagihan yang telah dibayar sesuai ketentuan	1400 Kwitansi	1	110	168	134	120	227	-	-	-	126	195	178
5	Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang telah dibukukan	57 Dokumen	3	3	3	3	3	3	-	-	-	6	3	3
6	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan Keuangan yang dibuat sesuai ketentuan	20 Laporan	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	20 Laporan	4	3	5	2	2	1	-	-	-	2	0	4

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Rusdalifah, SE
NIP : 19750503 200701 2 026
Jabatan : AnalisTata Laksana

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan											
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Melaksanakan tugas berdasarkan permasalahan Tata Laksana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah Dokumen	1447	127	116		91	110	-	173	140	76	100	160	93
2	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan	294	12	45	27	21	22	25	22	23	21	37	21	18
3	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah Laporan	33	2	-	-	2	8	-	5	4	7	1	3	1
4	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Tata Laksana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen	27	1	5	2	-	-	5	10	-	2	-	-	2
5	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Dokumen	145	21	4	56	40	10	13	56	47	35	33	45	68

PENGUKURAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PRINDUSTRIAN

Nama : Anita, A.Md
NIP : 19850315 200501 2 005
Jabatan : Pengelola Keuangan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulanan												
				Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Menyusun dokumen dan bukti-bukti kegiatan secara tertib dan teratur.	Jumlah dokumen yang diarsipkan	1000 Dokumen	0	20	116	262	114	229	156	143	123	217	185	169	
2	Menyimpan dokumen usulan pembayaran SPP, SPM dan dokumen peraturan	Jumlah dokumen yang diarsipkan	40 Dokumen	3	10	36	12	12	27	12	24	18	30	21	36	

3	Menerima dan mencatat nomor, tanggal dan pokok surat yang diterima oleh subbag keuangan ke dalam buku agenda dalam rangka tertib administrasi	Jumlah surat yang diagendakan	30 Surat	7	5	11	6	2	9	5	3	3	4	3	5	
4	Mencatat dan mengarsip naskah dinas yang diselesaikan dan diproses lingkup subbag keuangan secara tertib dan	Jumlah dokumen	15 Dokumen	1	2	1	1	1	6	7	5	5	8	4	1	
5	Menginventarisasi pengeluaran keuangan / membuat kartu kontrol sesuai prosedur yang ditentukan dalam rangka tertib	Jumlah dokumen	552 Dokumen	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100 Kegiatan	16	42	90	34	47	67	38	39	50	77	53	50	

**MONEV RENSTRA
CAPAIAN IKU 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69%	73,03%	105,84%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM dalam Mennyakong Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	3,6%	4,5%	124%
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai SAKIP Disnakerind	81,55	83,9	102,88%

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,



MASTURI, S. STP

NIP. 19770705 199612 1 004

MATRIK KESELAKSIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	PROGRAM			PROGRI AM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Meningkatkan pelayanan tenaga kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja	1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Kompeten		1	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasifikasi Kompetensi (DKK)		910.380.784,00	
														Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasifikasi Kompetensi (DKK)		987.955.260,00	
											Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja	Persentase Lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Peningkatan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		0,00	
														Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Peningkatan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (DPPK)		10.400.000,00	
														Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota (DKK)		92.350.000,00	
														Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota (DKK)		154.185.150,00	
											Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja	Persentase Lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		80.645.540,00	
											Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Meningkatnya Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		49.980.945,00	
						2. Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Sarapan Tenaga Kerja Yang Terlatih		1	1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Pelayanan Antar Kerja		230.545.011,99	
														Pelaksanaan Kesempatan Kerja		554.855.830,00	
											2. Penelitian Loka Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	Pengawasan dan Pengendalian UPTK		5.000.000,00	
											3. Pengelompokan Informasi Pasar Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Job Fair/Bursa Kerja		199.987.196,00	
											4. Peningkatan PMS di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Pengembangan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		22.190.000,00	
														Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Pemasaran Penempatan		99.960.300,00	
						3. Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan kerja		1	1. Penempatan Tenaga Kerja (DKK)	Meningkatnya Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	Pengawasan RTR Makin		207.565.674,00	
														Swakelola Penempatan Rencana Tenaga Kerja/Minim		24.744.247,00	
						4. Hubungan Industrial	Meningkatnya Perundingan Tenaga Kerja	1. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berakumulasi 2. Persentase tenaga kerja yang terlindungi jaminan ketenagakerjaan		1	1. Pengawasan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang diadukan	Pengawasan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		43.554.076,00	
														Pengembangan Perundingan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial		5.173.453.091,00	

						Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangan Kantor (RPT. BLK)		4.963.488,00	
						Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		131.747.836,00	
						Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RPT. BLK)		26.488.623,00	
						Pengadaan Peralatan Rumah Tangga		18.854.195,00	
						Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (RPT. BLK)		7.945.203,00	
						Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan		29.999.040,00	
						Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan(RPT.BLK)		7.956.589,00	
						Pengadaan Bahan/Material		40.000.000,00	
						Fasilitas Konjangan Tami		25.000.000,00	
						Fasilitas Konjangan Tami(RPT.BLK)		2.000.000,00	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPD		706.773.000,00	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPD(RPT.BLK)		134.404.000,00	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPD		34.975.000,00	
Meningkatnya kualitas pengkutan	Nilai komponen pengkutan	4	Administrasi Keuangan/Perangko t Daerah	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan dengan optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Aksesoris Kelengkapannya		21.978.000,00	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		20.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai komponen pelayanan	5	Pengadaan Barang MMH Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai penganggaran yang efisien dengan	Pengadaan Mebel		49.833.087,00	
						Pengadaan Mebel(RPT. BLK)		34.563.059,00	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(RPT. BLK)		25.878.351,00	
Meningkatnya kualitas evaluasi internal	Nilai komponen evaluasi internal	6	Pemeliharaan Barang MMH Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Konstruksi Perorangan Dinas atau Konstruksi Dinas tabatan		0,00	
						Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Konstruksi Dinas, Operasional atau Lapangan		116.003.000,00	
						Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya		19.000.000,00	

